

BAB V

TEMUAN DAN ANALISIS DATA

5.1 Faktor Individu

Individu merupakan sumber daya yang berperan sentral dalam organisasi. Individu atau sumber daya manusia berperan sebagai pelaksana program atau kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan organisasi. Oleh sebab itu, dalam mengelola organisasi diperlukannya individu atau sumber daya yang berkualitas. Karena kinerja organisasi tidak akan maksimal jika organisasi tidak memiliki individu yang berkualitas. Kualitas individu atau sumber daya manusia organisasi terlihat dari baiknya kompetensi yang dimiliki.

5.1.1 Pengetahuan

Kinerja yang baik adalah kinerja yang optimal, yaitu kinerja yang sesuai dengan standar organisasi dan mendukung pencapaian tujuan. Salah satu faktor yang mendukung tercapainya kinerja organisasi tersebut tidak terlepas dari pengetahuan yang dimiliki oleh pegawai yang ada. Semakin baik tingkat pengetahuan seorang pegawai akan semakin baik pula dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Pengetahuan ini mengacu kepada pengetahuan yang dimiliki pegawai yang berhubungan dengan tugas pekerjaannya.

Stunting merupakan permasalahan yang cukup serius, dimana diperlukannya orang-orang yang memahami dengan baik apa itu *stunting* dan cara

penanggulangannya. Oleh sebab itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman yang merupakan *leading sector* penanganan *stunting* membutuhkan pegawai yang memiliki pengetahuan yang baik untuk menangani permasalahan ini. Pengetahuan seorang terhadap tugasnya salah satunya dipengaruhi oleh kesamaan latar belakang pendidikannya dengan jabatan atau tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Selain memiliki pendidikan yang sesuai, pegawai di Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman khususnya yang memiliki peran dalam menanggulangi *stunting* juga harus mengetahui segala tugas pokok dan fungsinya, karena tujuan adanya tugas pokok dan fungsi tersebut adalah memberikan gambaran terhadap ruang lingkup tugas masing-masing pegawai. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman untuk mengetahui pengetahuan anggota yang bertugas terkait masalah *stunting* ini:

“Untuk petugas yang *stunting* sesuai dengan bidang pendidikannya. *Stunting* itu merupakan tugas bagian Kesmas ya, jadi untuk kabidnya sendiri itu merupakan S2 kesehatan masyarakat. Lalu kasinyapun yaitu seksi kesehatan gizi dan keluarga S2 juga bidang gizi. Itu sangat membantu tentunya dalam pelaksanaan tugasnya, tentu saja akan mempermudah dalam menjalankan tupoksi masing-masing terutama dalam penanganan *stunting* ini...Untuk tupoksi saya rasa mereka memahami dengan baik”. (Wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman tanggal 13 November 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman menunjukkan bahwa untuk *stunting* sendiri ditangani oleh bidang kesehatan masyarakat. Dimana kepala bidang dan kepala seksinya memiliki latar belakang pendidikan yang relevan dengan jabatannya. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat

merupakan lulusan S2 dibidang Kesehatan Masyarakat. Begitu juga Kepala Seksi Gizi dan Kesehatan Keluarga juga memiliki latar belakang pendidikan S2 dibidang Gizi. Dengan latar belakang pendidikan yang relevan ini tentu saja mempermudah dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian untuk tupoksi semua pegawai yang berperan dalam penanganan *stunting* sendiri sudah memahami dengan baik. Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dalam wawancara dengan peneliti:

“Paham, pemahaman tupoksi cukup baik ibuk rasa, untuk kasi gizi dan kesehatan keluarga itu S1 nya dibidang gizi ya, lalu S2 nya juga berkaitan dengan kesehatan. Jadi sesuai dengan bidang pendidikannya. Lalu jika mereka tidak mengerti dengan tugas biasanya mereka akan bertanya kepada atasan atau kawan”.
(Wawancara dengan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat tanggal 15 Desember 2020)

Berdasarkan wawancara menunjukkan memang benar para anggota sudah memahami dengan baik tupoksi mereka ditambah lagi dengan latar belakang pendidikan yang sesuai memberikan dukungan yang sangat baik terhadap pengetahuan dalam melaksanakan tupoksi terutama dalam menanggulangi masalah *stunting*. Kemudian jika mereka mengalami kendala biasanya akan bertanya kepada atasan maupun rekan kerja. Selain itu Kepala Seksi Gizi dan Kesehatan Keluarga Kabupaten Pasaman juga mengungkapkan kepada peneliti:

“Kalo mengenai tupoksi saya rasa sudah memahami ya, yang utama dalam bekerja tentu harus memahmi tupoksinya dahulu kan, kalau tidak gimana mau bekerja, *Alhamdulillah* kami dan petugas lainnya sudah memahami tupoksi dengan cukup baik ya untuk pengetahuan dasar tentang *stunting* yang harus petugas miliki, faktor determinan

terjadinya *stunting*, pengukuran status gizi balita, intervensi dan pencegahannya terus siapa saja sasarannya”. (Wawancara dengan Kepala Seksi Gizi dan Keluarga tanggal 16 November 2020)

Berikut wawancara peneliti dengan salah satu petugas gizi puskesmas bonjol

“Ada memahami. Kita kan itu lintas program kalo ibu hamilnya bagian KIA, bagian gizi ada orang gizi, bagian keslingnya juga ada keslingnya”. (Wawancara dengan Petugas Gizi Puskesmas Bonjol tanggal 11 Desember 2020)

Berdasarkan wawancara menunjukkan petugas gizi yang ada di Puskesmas yang juga berperan penting dalam penanggulangan *stunting* juga memahami tupoksi dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan pengetahuannya terhadap pembagian tugas yang diberikan. Begitu pula dengan kader yang bertugas secara langsung dalam setiap kegiatan Posyandu juga telah memahami tugasnya masing-masing. Hal ini disampaikan oleh Kader Posyandu Nagari Aia Manggih kepada peneliti:

“untuk kader tugasnya biasanya melakukan pencatatan, pembagian *shift*, penimbangan, pemberian makanan tambahan, vitamin dan obat cacing juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Untuk pengetahuan mengenai tugas kami sebagai kader itu dilakukan dulu pembekalan berupa pelatihan yang diajarkan oleh petugas Puskesmas atau orang Dinas Kesehatan”. (Wawancara dengan Kader Posyandu Nagari Aia Manggih tanggal 20 februari 2021)

Hal senada juga disampaikan oleh salah satu Kader Posyandu Nagari Koto Kaciak dalam wawancara bersama peneliti berikut ini:

“Tiap bulan anak ditimbang terus buat laporan per bulannya. Dibulan Februari sama Agustus anak diukur tinggi badannya, mengukur lika sama lila sekaligus pemberian obat cacing, secara umum itu tugas kami sebagai kader, untuk pengetahuan mengenai *stunting*, *Alhamdulillah* paham, cuman kadang dalam pelaksanaan tugas ada beberapa kader yang kadang belum paham biasaya itu kader-kader baru, tapi secara keseluruhan sudah paham mengenai tugas masing-masing. Terus kan

kami juga didampingi oleh petugas Puskesmas dan bidan, jadi ada yang selalu mengarahkan dan tempat bertanya jika kami ragu atau tidak tahu...untuk petugas atau bidan biasanya tugasnya melakukan imunisasi dan penyuluhan kepada balita atau sosialisasi kepada masyarakat, untuk tugas kami sebagai kader kemudian petugas puskesmas dan bidan sudah mengetahui dengan baik ”. (Wawancara dengan Kader Posyandu Nagari Koto Kaciak tanggal 19 Maret 2021)

Oleh sebab itu, dari semua wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa semua pegawai atau petugas pelaksana penanggulangan *stunting* di Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman memiliki pengetahuan yang baik. Selain itu, berikut dapat dilihat beberapa indikator kegiatan program gizi yang dilakukan dalam usaha menangani *stunting* di Kabupaten Pasaman:

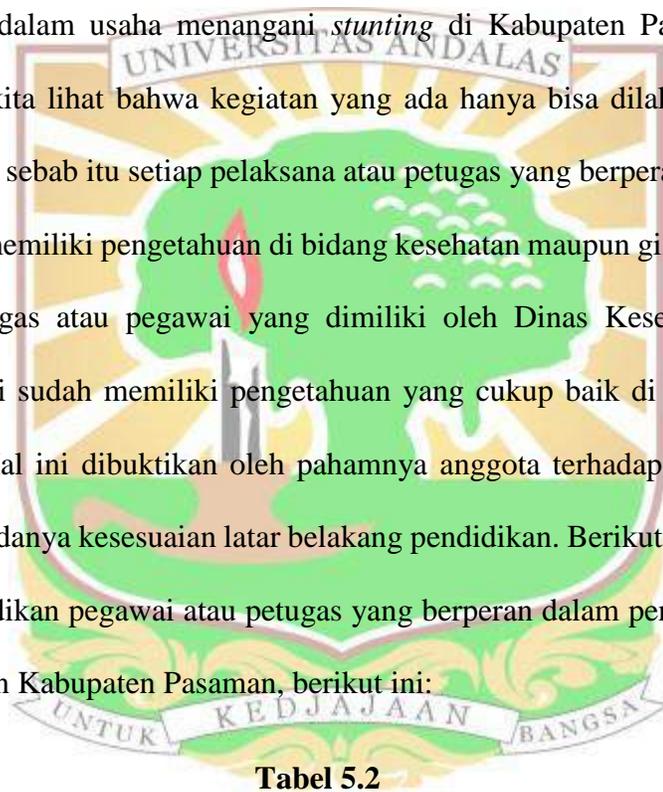
Tabel 5.1 Indikator Program Gizi dalam Menangani *Stunting*

| Program | Indikator |
|----------------|---|
| Perbaikan Gizi | 1. Bayi usia sampai 6 bulan mendapat ASI Eksklusif |
| | 2. Ibu hamil mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan |
| | 3. Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapat makanan tambahan |
| | 4. Remaja putri mendapat TTD (Tablet Tambah Darah) |

| | |
|--|--|
| | 5. Balita ditimbang berat badannya |
| | 6. Balita 6-59 bulan mendapat kapsul Vitamin A |
| | 7. Ibu nifas mendapat kapsul vitamin A |

Sumber: Laporan Kinerja Program Gizi Seksi Gizi dan Kesehatan Keluarga 2019

Berdasarkan Tabel 5.1 menunjukkan beberapa indikator kegiatan program perbaikan gizi dalam usaha menangani *stunting* di Kabupaten Pasaman. Indikator tersebut dapat kita lihat bahwa kegiatan yang ada hanya bisa dilakukan oleh sektor kesehatan. Oleh sebab itu setiap pelaksana atau petugas yang berperan dalam kegiatan tersebut harus memiliki pengetahuan di bidang kesehatan maupun gizi yang sesuai dan mumpuni. Petugas atau pegawai yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman sendiri sudah memiliki pengetahuan yang cukup baik di bidang kesehatan maupun gizi. Hal ini dibuktikan oleh pahamiannya anggota terhadap tugas pokok dan fungsinya dan adanya kesesuaian latar belakang pendidikan. Berikut dapat dilihat latar belakang pendidikan pegawai atau petugas yang berperan dalam penanganan *stunting* Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman, berikut ini:



Tabel 5.2

Latar Belakang Pendidikan Pegawai dan Petugas Gizi Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman

| No | Jabatan | Nama | Pendidikan |
|----|---------------------------------------|---|------------|
| 1 | Kabid Kesehatan Masyarakat | Nurhalimah, SKM | S2 |
| 2 | Kasi Gizi dan Kesehatan Keluarga | Desmariza,SKM,MPH | S2 |
| 3 | Petugas Gizi Puskesmas Ladang Panjang | Putri Rahmatika, A.Md.Gz Inenti Sovia, AMG | D3 D3 |

| | | | |
|----|---------------------------------------|--|----------------|
| 4 | Petugas Gizi Puskesmas Simpati | Ika Triyani Ilma Yenti, S.Gz | D3 S1 |
| 5 | Petugas Gizi Puskesmas Kumpulan | Nella Defi Anggraini, A.Md Minda Sari | D3 S1 |
| 6 | Petugas Gizi Puskesmas Bonjol | Yuni Anisa Pohan, AMG Nunung Sulastri | D3 D3 |
| 7 | Petugas Gizi Puskesmas Lubuksikaping | Ferri Ilhamdi, S.Gz Liya Sariyenti A.md.Gz | D4 D3 |
| 8 | Petugas Gizi Puskesmas Sundatar | Lili Agus, AMG Fitria Oka Suci, AMG | D3 D3 |
| 9 | Petugas Gizi Puskesmas Pegang Baru | Evi Mariani Daulay, AMG Resti Rahdia Fitri | D3 D3 |
| 10 | Petugas Gizi Puskesmas Kuamang | Maysari Hayasman | D4 |
| 11 | Petugas Gizi Puskesmas Tapus | Niftah Utami, A.Md.Gz Regfasari.M | D3 D3 |
| 12 | Petugas Gizi Puskesmas Lansat Kadap | Meliningsih | S1 |
| 13 | Petugas Gizi Puskesmas Rao | Esi Fitris Roza Meriza Meli, AMG | D3 S1 |
| 14 | Petugas Gizi Puskesmas Koto Rajo | Yossi Juniati Harika Putri, Amd.Gz Fitrinawati, AMG | D3 D3 |
| 15 | Petugas Gizi Puskesmas Pintu Gadang | Rizelli Hairulita, S.Gz | S1 |
| 16 | Petugas Gizi Puskesmas Silayang | Esi Fitria Roza | S1 |
| 17 | Petugas Gizi Puskesmas Cubadak | Febby Olivia Nofitri, A.Md.Gz Mikha Agus Sevente, A.Md.Gz | D3 D3 |
| 18 | Petugas Gizi Puskesmas Simpang Tonang | Wilda Noveri Agnestina N Siritotet Irnal Marninda, A.Md.Gz | D3 D3 D3 |

Sumber: Olahan peneliti dari Dokumentasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman 2020

Berdasarkan Tabel 5.2 menunjukkan bahwa pegawai atau petugas yang berperan dalam menangani *stunting* memiliki latar belakang sarjana dan diploma bidang

kesehatan dan gizi. Dengan pendidikan yang dimiliki ini akan mempermudah memahami dan melaksanakan tupoksi.

Menurut Mahmudi, faktor individu yang mempengaruhi kinerja salah satunya pengetahuan. Pengetahuan ini mengacu kepada pengetahuan yang dimiliki pegawai (tahu apa yang harus dilakukan)⁴¹. Pengetahuan pegawai atau petugas yang berperan dalam menangani atau menanggulangi permasalahan *stunting* di Kabupaten Pasaman sudah cukup baik. Hal tersebut dibuktikan dengan relevannya latar belakang pendidikan semua pegawai atau petugas dengan tugas pekerjaannya. Kemudian adanya pemahaman yang baik terhadap tupoksi yang dimiliki.

5.1.2 Kemampuan

Kemampuan mengacu pada kemampuan untuk melakukan pekerjaan. Dalam penanggulangan *stunting* di Kabupaten Pasaman kemampuan pegawai atau petugas dilihat dari kemampuan pelaksanaan tugas dan penggunaan sarana prasarana yang digunakan dalam penanggulangan *stunting*. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman terkait kemampuan pegawai atau petugas dalam penanggulangan *stunting*:

“Saya rasa kemampuan dalam pelaksanaan tugas yang diberikan lalu penggunaan peralatan atau perlengkapan sudah cukup baik ya. Karena dilihat selama ini pegawai mengerti dalam menyelesaikan tugasnya dan penggunaan perlengkapan atau fasilitas yang digunakan dalam kegiatan gizipun sejauh ini belum memiliki kendala”. (Wawancara

⁴¹ Mahmudi, loc.cit.

dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman tanggal 13 November 2020)

Wawancara tersebut menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan tugas pegawai atau pelaksana memiliki kemampuan cukup baik. Dimana pegawai yang bertugas dalam penanggulangan masalah *stunting* ini memahami dan mampu menyelesaikan tugas pekerjaannya dengan baik. Penggunaan fasilitas kerja pun mereka bisa menggunakannya cukup baik. Oleh karena itu, untuk saat ini Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman belum memiliki kendala terkait kemampuan pegawai/petugas dalam pelaksanaan tugas penanggulangan *stunting*. Sehingga organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara cepat dengan memiliki pegawai yang mempunyai kemampuan yang mumpuni. Kemampuan dalam penggunaan sarana dan prasarana juga disampaikan oleh Kepala Seksi Gizi dan Kesehatan Keluarga dalam wawancara berikut ini:

“Penggunaan sarana-prasarana atau fasilitas *stunting*, mereka sudah memahami dibuktikan mereka sudah dapat menggunakannya dengan baik. Bentuk peralatannya misalnya timbangan, terus alat antropometri biasanya digunakan dalam Posyandu, sejauh ini *Alhamdulillah* mereka bisa menggunakannya”. *(Wawancara dengan Kepala Seksi Gizi dan Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman tanggal 16 November 2020)*

Berdasarkan wawancara dengan Kasi Gizi dan Kesga diketahui kemampuan pegawai atau petugas pelaksana penanggulangan *stunting* sudah cukup baik. Para pegawai atau petugas dapat mengerjakan tugasnya dengan baik, baik dalam memberikan penyuluhan, sosialisasi dan pemberian pelatihan kepada kader. Kader posyandu yang berperan secara langsung dalam kegiatan posyandu juga memahami dan

mampu melaksanakan semua tugas yang diberikan. Penggunaan peralatan dalam proses Posyandu yaitu seperti timbangan, alat antropometri kit mereka juga sudah mampu menggunakannya. Hal ini disampaikan oleh salah satu Kader Posyandu Nagari Aia Manggih berikut ini:

“Kalau dalam Posyandu biasanya kalau petugas puskesmas memberikan penyuluhan. Misalnya ada anak yang kurang gizi atau berat badannya dibawah garis merah, biasanya diberikan konsultasi. Kalau untuk kami kader *inshaAllah* dalam melaksanakan tugas sudah bisa melakukan semuanya. Biasanya kerja kami itu mencatat, menimbang atau mengukur, membagi *shift* dan memberikan makanan tambahan...Kalau dulu pas ada pelatihan yang diadakan oleh Dinas Kesehatan, para petugasnya penjelasannya ada mudah kami pahami. Mereka kan juga sesuai dengan bidang mereka jadi bisalah mereka menjelaskan dengan baik”. (*Wawancara dengan Kader Posyandu Nagari Aia Manggih tanggal 20 februari 2021*)

Hal senada juga disampaikan oleh salah satu Kader Posyandu Nagari Koto Kaciak Kabupaten Pasaman berikut ini:

“Menurut saya pahamlah kak, yang mengajarkan kami tentang gizi dan penggunaan alat itu kan ada dari petugas Puskesmas dan bidan, apa yang disampaikan jelas dan mudah dipahami dan kami juga bertanya jawab tentang materi yang disampaikan yang tidak dimengerti. Seperti yang saya bilang tadi paling kader-kader baru yang masih kurang paham dalam pelaksanaan tugasnya kak, tapi itu kan jelas karena mereka baru”. (*Wawancara dengan Kader Posyandu Nagari Koto Kaciak tanggal 19 Maret 2021*)

Kemudian untuk menunjang tercapai tujuan dalam penurunan angka *stunting* di Kabupaten Pasaman. Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman juga melakukan peningkatan kapasitas tentunya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pegawai atau petugas pelaksana. Hal ini disampaikan dalam wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman.

“Untuk pengembangan kemampuan ada dilakukan kayak seminar, pelatihan, sosialisasi. Untuk program lebih jelasnya sama kasi kesga yang bertanggung jawab terhadap *stunting* ini”. (Wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman tanggal 13 November 2020)

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Seksi Gizi dan Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman dalam wawancara dengan peneliti:

“Ada, tapi untuk waktu itu tidak rutin ya, karena biasanya tergantung pendanaanya. Kalo proposal kita disetujui kita laksanakan ya paling tidak dalam setahun ada lah, biasanya peningkatan kapasitas yang kita adakan dalam bentuk PMBA, sosialisasi *Positif Deviance*, kemudian kemaren kami baru melaksanakan *workshop*”. (Wawancara dengan Kepala Seksi Gizi dan Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman tanggal 16 November 2020)

Berdasarkan wawancara dapat kita ketahui bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman untuk meningkatkan kemampuan pegawai atau pelaksana percepatan penanggulangan *stunting* juga melakukan peningkatan kapasitas. Namun untuk tahun Peningkatan Kapasitas ini sendiri biasanya ada dilakukan setiap tahunnya namun tidak rutin. Peningkatan kapasitas yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman ini juga dibenarkan dalam wawancara peneliti dengan Petugas Gizi Puskesmas Simpang Tonang.

“Ada, kami sering mengikuti pelatihan atau pertemuan-pertemuan ke Dinas Kesehatan. Ada waktu itu ke Padang juga. Kalau jadwalnya tidak terjadwal sih. Kalo ada dinas mengadakan kegiatan kami datang gitu”. (Wawancara dengan Petugas Gizi Simpang Tonang tanggal 24 November 2020)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat kita ketahui bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman memang memiliki kegiatan untuk meningkatkan kemampuan

pegawai atau petugas. Sehingga dalam upaya penurunan *stunting* petugas memiliki kemampuan yang baik dalam pelaksanaan tugas tanggung jawabnya. Selain itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman juga selalu mengingatkan cara menggunakan alat pengukuran *stunting*. Hal ini juga senada dengan yang disampaikan oleh Petugas Gizi Puskesmas Bonjol Kabupaten Pasaman.

“Kita kan setiap kali ada pertemuan selalu disinggung itu bagaimana penggunaan antropometri. Antropometri itu kan termasuk mempengaruhi cara kita mengukur, nah harusnya alat ukurnya yang standar kalo alat ukurnya tidak standar cuman meteran kain itu gak mungkin, cara mengukurnya juga ada. Kalau itu *gak* dilatihkan otomatis nanti datanya bisa bias. Balita yang tidak *stunting* nanti menjadi *stunting*. Pelatihan kita penggunaan alat ada. Cuman kalau kita ada pertemuan selalu disinggung diterangkan lagi”. (Wawancara dengan Petugas Gizi Puskesmas Bonjol tanggal 11 Desember 2020)

Berdasarkan wawancara dengan Petugas Gizi Bonjol menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten pasaman juga selalu mengingatkan bagaimana penggunaan salah satu sarana dan prasarana yang digunakan untuk pengukuran bayi pada saat posyandu yaitu antropometri kit. Dimana setiap kali pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan menerangkan kembali bagaimana cara penggunaannya. Hal ini dilakukan agar dalam pengukuran petugas tidak melakukan kesalahan sehingga berakibat fatal menyebabkan data tidak akurat. Selain itu kader sebagai petugas teknis dilapangan juga sering diberikannya pelatihan dan adanya penyegaran kader. Hal ini disampaikan oleh salah satu Kader Posyandu Nagari Koto Kaciak sebagai berikut:

“Ada kak di tahun 2020, biasanya ada pelatihan atau sosialisasi terus ada juga namanya penyegaran kader yang dilakukan sekali dalam

setahun kak, penyegaran kader ini merupakan suatu langkah dalam pembinaan dalam upaya pengembangan pengetahuan dan keterampilan kader secara berkerlanjutan”. (*Wawancara dengan Kader Nagari Koto Kaciak tanggal 19 Maret 2021*)

Berikut dapat dilihat gambar-gambar beberapa kegiatan dalam peningkatan kemampuan petugas yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman:

Gambar 5.1

Peningkatan Kapasitas Bidan Desa dan Kader dalam Pemberian Makanan Pada Bayi dan Anak (PMBA) Tahun 2020



Sumber: Dokumentasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman

Gambar 5.1 menunjukkan salah satu upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman dalam meningkatkan kemampuan pelaksana. Dimana kegiatan yang ditujukan kepada bidan desa dan kader posyandu untuk meningkatkan kemampuan dalam pemberian makanan tambahan untuk balita. Kemudian juga ada sosialisasi *Positif Deviance* dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 5.2
Sosialisasi *Positif Deviance* Bagi Petugas Gizi dan Bidan Desa Tahun 2020



Sumber: Dokumentasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman

Gambar 5.2 merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman dalam meningkatkan kemampuan petugas gizi dan bidan desa. Sosialisasi ini *positive deviance* (penyimpangan positif) adalah upaya peningkatan status gizi dengan merubah perilaku masyarakat. Sehingga dengan sosialisasi ini mampu meningkatkan kemampuan petugas gizi dan bidan desa dalam mempengaruhi dan merubah pola perilaku masyarakat terutama dalam masalah gizi.

Menurut Mahmudi, dalam faktor individu selain pengetahuan juga meliputi kemampuan. Kemampuan ini mengacu kepada kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas pekerjaan⁴². Kemampuan pegawai atau petugas dalam penanganan *stunting* di Kabupaten Pasaman memiliki kemampuan yang baik. Dimana mereka dapat menjalankan tupoksi dengan baik. Para petugas juga mampu dalam menggunakan semua fasilitas yang digunakan dalam kegiatan gizi atau dalam proses penanganan *stunting*. Kemudian kemampuan petugas pelaksana *stunting* juga ditunjang dengan

⁴² Ibid.

adanya peningkatan kapabilitas yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten. Sehingga mereka dapat melaksanakan tugas pekerjaan dengan baik.

5.1.3 Motivasi

Motivasi berasal dari bahasa Latin “*Movere*” yang artinya menggerakkan. Motivasi adalah suatu energi penggerak, pengarah, dan memperkuat tingkah laku. Menurut Mahfudh Shalahuddin, motivasi didefinisikan sebagai dorongan dari dalam yang digambarkan sebagai harapan, keinginan dan sebagainya, yang bersifat menggiatkan atau menggerakkan individu untuk bertindak dan bertingkah laku, guna memenuhi kebutuhan⁴³. Untuk melihat motivasi pegawai atau petugas dalam penanggulangan *stunting* di Dinas Kabupaten Pasaman dapat dilihat dari wawancara berikut:

“Kalau *punishment* atau *reward* untuk pegawai disini belum ada ya, disini pegawai bekerja masih berdasarkan ada namanya peraturannya itu untuk melihat kerja pegawai yaitu SKP ya. Jadi, kalau untuk *punishment* ataupun *reward* yang dibuat di Dinas Kesehatan sampai saat ini belum ada jadi pegawai bekerja masih berdasarkan itu. Untuk *reward* dalam penanganan *stunting* untuk Puskesmas dengan pencapaian penurunan *stunting* tertinggi diwilayah kerjanya. Ada kami rencanakan kemaren itu, dengan pemberian tiket umrah. Namun masih belum terlaksana terkendala dana kemudian susah juga gimana membaginya nanti ya soalnya *reward* ini untuk kelompok bukan untuk perorangan”. (Wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman tanggal 13 November 2020)

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman menunjukkan bahwa tidak adanya *reward* ataupun *punishment*

⁴³ Sarinah, Mardalena.2017. Pengantar Manajemen. Yogyakarta: Penerbit Deepublish. Hal 76

husus yang diberikan kepada pegawai. Dimana dalam melakukan pekerjaan pegawai Dinas Kesehatan didasarkan pada SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) yang memotivasi pegawai agar bekerja dengan baik. Namun, penanganan *stunting* yang dilakukan oleh Puskesmas Dinas Kabupaten Pasaman berusaha untuk memberikan *reward* kepada Puskesmas dengan capaian kinerja penurunan *stunting* terbaik. Namun, masih sebatas perencanaan karena terkendala dana dan masih perlunya pemikiran ulang *reward* yang terbaik yang akan diberikan kepada puskesmas terbaik nantinya. Terkait motivasi ini, hal hampir serupa juga disampaikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman.

“kalau *reward* dan *punishment* disini *gak* ada ya, palingan motivasi dalam penanganan *stunting* tentunya kita lakukan untuk menurunkan angka *stunting* di kabupaten kita ini ya, telah menjadi tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Tapi kalau untuk puskesmas ada kami kasih *reward* baru-baru ini ya. *Reward* ini ditujukan kepada Puskesmas dengan entrian status gizi tercepat, kemaren itu *reward*nya dalam bentuk handphone”. (Wawancara dengan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat tanggal 15 Desember 2020)

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Seksi Gizi dan Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman berikut ini:

“*Reward* yang diberikan baru untuk puskesmas yang dengan cepat mengentrikan hasil pengukuran status gizi kedalam aplikasi eepbgm atau siegizi terpadu, belum untuk yang turun prevalensi *stunting*nya. Bentuknya berupa ponsel untuk memudahkan tenaga gizi berkomunikasi dengan bidan desa dan kader”. (Wawancara dengan Kepala Seksi Gizi dan Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman 16 November 2020)

Berdasarkan wawancara tersebut benar bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman tidak memiliki sistem *reward* dan *punishment* terhadap pegawai. Tetapi untuk Puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman baru ini ada menetapkan sistem *reward* kepada puskesmas yang melakukan pengetrian data pengukuran atau status gizi balita tercepat ke dalam aplikasi pelaporan status gizi. Selain karena adanya rasa tanggung jawab terhadap tugas yang diemban, adanya keinginan dan rasa kepedulian untuk menurunkan angka *stunting* juga menjadi salah satu motivasi pegawai atau petugas penanganan *stunting* Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman. Hal ini juga disampaikan oleh salah satu Petugas Gizi Puskesmas Simpang Tonang dalam wawancara dengan peneliti:

“Motivasi ya itu, untuk menurunkan angka prevalensi *stunting* disini. Kemudian ini juga sudah menjadi tugas kita kan. Kita berusaha melaksanakan sebaik-baiknya semoga *stunting* di Simpang Tonang ini tidak menjadi daerah yang tinggi *stunting* lagi”. (Wawancara dengan Petugas Gizi Puskesmas Simpang Tonang tanggal 24 November 2020)

Hal senada juga disampaikan oleh Petugas Gizi Puskesmas Bonjol dalam wawancara dengan peneliti berikut ini:

“Kasih kan, generasi kita kan misalnya 10 atau 20 tahun lagi mau jadi apa? *gak* ada habibi-habibi yang lain. Pak habibi tu kan cerdas ya tapi pendek, bisa jadi kalo tinggi lebih cerdas lagikan. Kemudian emang sebagai tugas juga ya sebagai ASN, udah diamanatkan pemerintah”. (Wawancara dengan Petugas Gizi Puskesmas Bonjol tanggal 11 Desember 2020)

Berdasarkan wawancara ini dapat kita simpulkan motivasi pegawai atau petugas dalam penanganan *stunting* di Kabupaten Pasaman didorong oleh adanya rasa tanggung jawab akan melaksanakan tugas yang telah diberikan. Selain itu, rasa

kepedulian yang kuat terhadap menciptakan generasi muda bangsa yang sehat dan cerdas juga menjadi salah satu motivasi untuk menurunkan angka *stunting* di Kabupaten Pasaman.

Berdasarkan teori Mahmudi mengenai kinerja organisasi yang meliputi faktor individu. Faktor individu di Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman memiliki individu atau sumber daya manusia yang cukup kompeten. Dilihat dari pengetahuan pegawai ataupun petugas dalam rangka penanganan *stunting* sudah oleh pahamiya petugas tupoksinya dan memiliki latar belakang pendidikan yang relevan dengan jabatan akan mempermudah pegawai atau petugas dalam memahami dan melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Selain itu sumber daya manusia dalam juga mampu menyelesaikan tugas pekerjaannya dengan baik yang didorong oleh adanya rasa tanggung jawab atas pekerjaan yang dimiliki yang mewajibkan mereka untuk melaksanakan tugas secara maksimal. Kemudian adanya rasa kepedulian untuk menurunkan angka *stunting* di Kabupaten Pasaman sehingga dapat menciptakan generasi Pasaman yang sehat dan cerdas. Dapat disimpulkan faktor individu di Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman khususnya dalam upaya menurunkan angka *stunting* sudah cukup baik.

5.2 Faktor Kepemimpinan

Menggerakkan orang-orang pada dasarnya bukanlah sesuatu yang mudah. Untuk dapat menggerakkannya, dituntut seorang pemimpin haruslah mampu menggerakkan orang lain. Kemampuan atau seni menggerakkan orang lain inilah yang

disebut dengan kepemimpinan (*leadership*). Kepemimpinan sering diartikan sebagai kemampuan atau seni mempengaruhi orang lain agar mau dan dapat bekerja mengikuti kemauannya⁴⁴. Menjadi seorang pemimpin bukanlah hal sebatas menduduki jabatan dan menjalani tugas keseharian dengan baik. Tetap lebih daripada itu pemimpin harus memiliki beberapa hal sebagai modal dalam memimpin seperti berwibawa memiliki pengetahuan yang luas, tegas dan komunikatif⁴⁵. Kunci Kepemimpinan di Dinas Kabupaten Pasaman adalah mengutamakan komunikasi. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman kepada peneliti berikut ini:

“Kalau dalam memimpin itu yang utama komunikasi ya, bagaimana kita menjalin dengan baik komunikasi kita dengan pegawai kita. Jika kita sudah memiliki hubungan yang baik dengan mereka untuk mengarahkan mereka tentu lebih mudah. Permasalahan atau kendala mereka misalnya lebih mudah mereka sampaikan, mereka lebih terbukalah tibanya ya. Kemudian nantikan ada juga evaluasi ya, jadi disana pegawai juga bisa menyampaikan permasalahan baik itu dalam pelaksanaan tugasnya jadi nanti kita cari solusi sama-sama. Kalau bapak sendiri untuk memimpin itu komunikasi yang utama...kalau untuk apel pagi sekrang tidak ada karena *covid* , jadi biasanya arahan diberikan setiap adanya pertemuan mengenai *stunting* dan evaluasi yang diadakan tiga kali dalam setahun tadi”. (Wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman tanggal 13 November 2020)

Berdasarkan wawancara bersama Kepala Dinas Kesehatan Pasaman dapat kita lihat bahwa poin utama dalam kepemimpinan di Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman adalah komunikasi. Komunikasi yang baik akan menciptakan hubungan yang baik dengan bawahan. Sehingga dalam proses mempengaruhi bawahan pelaksanaan tugas

⁴⁴ Ibid., hlm 63

⁴⁵ Duha, Timotius. 2018. Perilaku Organisasi. Yogyakarta: deepublish publisher. Hal 97

juga lebih mudah. Kemudian, dengan adanya komunikasi yang baik juga meningkatkan keterbukaan bawahan terhadap permasalahan. Dimana bawahan tidak takut untuk bertanya kepada atasan atas kendala yang dihadapi baik itu dalam masalah penanggulangan *stunting* atau masalah-masalah lainnya. Bentuk arahan yang dilakukan oleh Kepala Dinas Kabupaten Pasaman sendiri dilakukan pada saat pertemuan-pertemuan terkait permasalahan *stunting* begitupula dengan evaluasi yang dilakukan tiga kali setahun di Dinas Kabupaten Pasaman. Biasanya pengarahan juga dilakukan ketika apel pagi, tetapi karena situasi tidak memungkinkan karena *covid* membuat apel ditiadakan.

Kepemimpinan yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman yang dibentuk oleh Kepala Dinas Kesehatan adalah berbentuk kekeluargaan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pasaman sebagai berikut:

“Kepemimpinan disini lebih ke kekeluargaan ya, kemudian dalam penanggulangan *stunting* sendiri karena bapak itu dokter dan kemaren menjabat sebagai kbid kesmas juga, tentu dia lebih paham baik dalam memberikan perintah atau arahan terkait penanggulangan *stunting* ini”. (Wawancara dengan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman pada 14 Desember 2020)

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat disimpulkan bahwa kepemimpinan yang dibentuk di Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman adalah lebih kepada kekeluargaan. Kemudian terkait penanggulangan *stunting*, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman ini sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat yang bertanggungjawab terhadap

penanganan permasalahan *stunting*. Sehingga dalam penanggulangan *stunting* sendiri dapat memberikan arahan atau perintah yang tepat karena beliau memahami dengan baik permasalahannya. Kepala Seksi Gizi dan Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman juga mengungkapkan terkait kepemimpinan di Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman sebagai berikut:

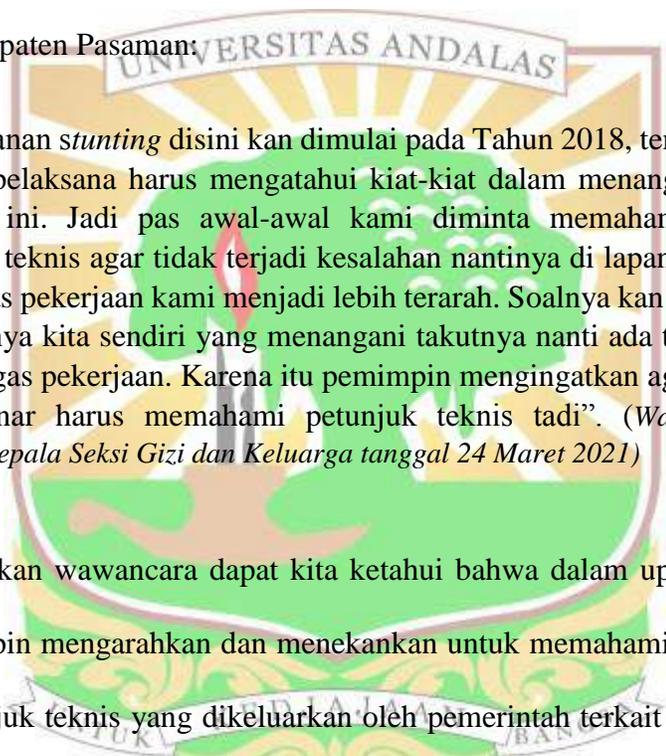
“Kalau ibuk pribadi ya merasa kepemimpinan bapak itu baik ya, dimana bapak juga orangnya *humble*, bapak mengarahkan tugas juga dengan baik, lalu dalam penanggulangan *stunting* sendiri bapak sebisa mungkin mendampingi atau hadir ya dalam acara misalnya pertemuan pelatihan dan sebagainya. Dengan kehadiran bapakkan juga membuat kami harus bekerja secara baik kan”. (Wawancara dengan Kepala Seksi Gizi dan Kesehatan Keluarga tanggal 16 November 2020)

Wawancara dengan Kepala Seksi Gizi dan Kesehatan Keluarga menunjukkan bahwa memang benar Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman memiliki hubungan yang baik dengan pegawainya. Kemudian adanya kehadiran pemimpin dalam kegiatan *stunting* yang dilakukan juga memberikan dorongan tersendiri bagi pegawai untuk berkerja secara baik.

Penangan *stunting* di Kabupaten Pasaman dalam mengarahkan pegawai atau bawahan pemimpin dalam hal ini Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman mengarahkan pegawai atau petugas untuk memahami betul petunjuk teknis penanganan *stunting* yakni terkait apa itu *stunting*, cara menangani *stunting* dan daerah wilayah lokus *stunting*. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman kepada peneliti:

“Di dalam penanganan *stunting* itu tidak terlepas dengan petunjuk teknis terkait dengan data, data terkait angka *stunting* setiap daerah beda-beda. Jadi, kita sebagai pemimpin pertama kali mengarahkan pegawai atau petugas untuk betul-betul juknis apa itu *stunting*, bagaimana penanganan *stunting*, dan sekaligus mempelajari wilayah atau daerah yang akan ditangani dalam rangka penanggulangan *stunting*”. (Wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman tanggal 23 Maret 2021)

Hal ini juga dibenarkan oleh Kepala Seksi Gizi dan Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman:



“Penanganan *stunting* disini kan dimulai pada Tahun 2018, tentu kami sebagai pelaksana harus mengatahui kiat-kiat dalam menanggulangi *stunting* ini. Jadi pas awal-awal kami diminta memahami betul petunjuk teknis agar tidak terjadi kesalahan nantinya di lapangan dan juga tugas pekerjaan kami menjadi lebih terarah. Soalnya kan *stunting* tidak hanya kita sendiri yang menangani takutnya nanti ada tumpang tindih tugas pekerjaan. Karena itu pemimpin mengingatkan agar kami benar-benar harus memahami petunjuk teknis tadi”. (Wawancara dengan Kepala Seksi Gizi dan Keluarga tanggal 24 Maret 2021)

Berdasarkan wawancara dapat kita ketahui bahwa dalam upaya penanganan *stunting* pemimpin mengarahkan dan menekankan untuk memahami tupoksi terlebih mengenai petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait penanggulangan *stunting* di kabupaten/kota. Hal ini bertujuan agar pegawai atau pelaksana tidak mengalami kesalahan dalam pelaksanaan tugas dan menghindari tumpang tindih pekerjaan dengan dinas lain yang terkait penanganan *stunting* khususnya di Kabupaten Pasaman. Selain itu, pemimpin juga mengharuskan pegawai atau pelaksana yang bertugas dalam menanggulangi *stunting* untuk menceritakan keluhan, kendala atau

hamabatan yang dirasakan dilapangan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman berikut ini:

“Ooo ini harus, harus petugas menyampaikan kendala dan kenluhan yang dihadapinya di lapangan dalam pencapaian target penurunan *stunting*. Kalau dia tidak mengeluhkan atau menceritakan apa hambatan yang ia rasakan justru dia sendiri yang akan kerepotan terkait mengatasi kendala atau hambatan tersebut”. (Wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman tanggal 23 Maret 2021)

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pasaman:

“Biasanya kalau ada kendala yang tidak bisa kami atasi lagi, kami akan membahasnya dengan pemimpin biasanya untuk meminta dan mencari solusi. Selain itu dalam evaluasi biasanya yang diadakan tiga bulan sekali segala kendala atau hambatan dalam penanganan *stunting* juga harus disampaikan, sehingga pemimpin atau pegawai yang lain mengetahui hambatan yang dirasakan dalam penanganan *stunting* ini, dan kita sama-sama cari solusi untuk kedepannya”. (Wawancara dengan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman tanggal 23 Maret 2021)

Kepala Seksi Gizi dan Kesehatan juga menyampaikan hal yang hampir serupa berikut ini:

“Pemimpin itu ibaratnya tempat kita mengadu, karena tidak semua hal dapat kami atasi sendiri apalagi jika ada kendala yang sulit diatasi atau dicari solusinya. Nanti kami tanya bagaimana menyelesaikannya. Kadangkannya dalam penanganan *stunting* khususnya di gizi itu ada target yang belum tercapai. Pas masa pelaksanaanya atau siap kami katakanlah kendalanya. Supaya pemimpin juga tahu dimana letak tidak tercapainya target dan dievaluasi di cari solusi sebagai bahan pertimbangan dan perbaikan untuk program selanjutnya”. (Wawancara dengan Kepala Seksi Gizi dan Keluarga tanggal 24 Maret 2021)

Berdasarkan wawancara dapat kita simpulkan bahwa Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman mengarahkan para pegawai untuk selalu menceritakan dan memberitahu setiap kendala yang dirasakan di lapangan. Hal ini bertujuan agar segala kendala dapat dicari jalannya bersama dan akan mempermudah dalam proses pelaksanaan program. Kemudian jika tidak diberitahukan, para pegawai atau petugas pelaksana *stunting* yang akan merasakan kesulitan sendiri dalam mencari solusi dari hambatan atau kendala tersebut. Sehingga kegiatan yang memiliki kendala tidak akan berjalan lancar yang menyebabkan tidak tercapainya target kegiatan ataupun program.

Menurut Mahmudi kinerja organisasi meliputi faktor kepemimpinan. Kepemimpinan sendiri meliputi kualitas pemimpin dalam memberikan dorongan, semangat, arahan, terhadap bawahan⁴⁶. Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman dalam upaya baik itu memberikan arahan maupun dorongan dalam bekerja pemimpin mengutamakan adanya komunikasi yang baik dengan bawahan. Komunikasi yang baik akan memberikan keleluasaan bawahan menyampaikan keluhan atau kendala dalam pelaksanaan pekerjaan. Selanjutnya dengan adanya komunikasi ini bawahan atau pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman merasakan adanya hubungan kekeluargaan yang terjalin antara pemimpin dan pegawai. Dalam penanganan *stunting* di Kabupaten Pasaman. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman sebagai pemimpin memerintahkan dan mengarahkan para pegawai atau ptugas untuk

⁴⁶ Mahmudi, loc.cit.

memahami petunjuk teknis dalam penanggulangan stunting ini. Kemudian pemimpin mendorong bahwa setiap kendala atau hambatan harus dilaporkan. Hal ini dilakukan agar para pegawai/petugas tidak kesusahan sendiri dalam mencari solusi. Oleh sebab itu, dapat peneliti simpulkan kepemimpinan di Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman cukup baik

5.3 Faktor Tim

Tim merupakan sekelompok orang yang saling berhubungan atau bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Sebuah kelompok kerja yang baik tidak tergantung kepada kecermelangan hasil kerja seorang anggota, tetapi pada bagaimana mereka melakukan kerja secara bersama-sama⁴⁷. Maka dalam penanggulangan stunting di Kabupaten Pasaman peneliti ingin melihat bagaimana tim bekerjasama dan berkoordinasi.

5.3.1 Kerjasama

Kerjasama merupakan cara yang paling efektif untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan mudah. Penanggulangan permasalahan *stunting* tidak terlepas dari adanya kerjasama antara berbagai pihak. Hal ini disebabkan karena *stunting* merupakan permasalahan multisektor. Penanganan *stunting* tidak bisa ditangani oleh satu pihak maka perlu adanya dukungan sektor lain selain Dinas Kesehatan. Peran multisektor

⁴⁷ Elvi Nofrida. 2014. Hubungan Iklim Kerjasama Dengan Semangat Kerja Pegawai Dinas Pendidikan Kota Solok. Jurnal Administrasi Pendidikan FIP UNP. Vol 2 No 1. Hal 188-831

sangat penting bagi keberhasilan penanggulangan *stunting*. Hal ini disampaikan dalam wawancara yang peneliti lakukan dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman.

“Sudah pasti ya, karena *stunting* tidak bisa ditangani oleh Dinas Kesehatan saja ya, karena faktor yang menyebabkan *stunting* inikan banyak ya, mulai dari perilaku masyarakat, kemiskinan, air bersih sanitasi dan sebagainya. Makanya untuk mengatasi ini banyak melibatkan berbagai macam sektor. Contohnya saja seperti kemiskinan tadi kan, itu tidak bisa kita yang Dinas Kesehatan yang menanganinya. Kita ini lebih ke spesifik namanya. Penanganan *stunting* ini ada yang namanya spesifik satu itu tugas kita lalu sensitif itu tugas sektor lain diluar dinkes”. (Wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman tanggal 13 November 2020)

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman menunjukkan bahwa penanganan *stunting* ini sangat diperlukannya kerjasama yang baik dengan lintas sektor. Hal ini disebabkan *stunting* merupakan permasalahan yang tidak bisa ditangani oleh Dinas Kesehatan saja namun perlu keterlibatan multisektor. Dimana Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman berperan dalam penanganan intervensi spesifiknya sedangkan sektor diluar Dinas Kesehatan berperan dalam penanganan intervensi sensitif. Hal senada juga disampaikan oleh salah satu Petugas Gizi Bonjol kepada peneliti.

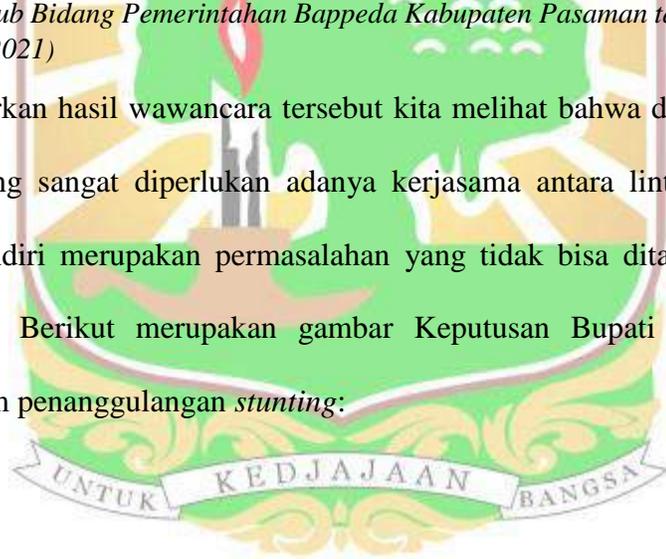
“Kalau Puskesmas tu kan ada penanggulangan spesifik namanya ya. Kalau spesifik itu dari Dinas Kesehatan pada umumnya ya mulai dari ibu hamilnya, ibu melahirkannya, PMTnya itu spesifik namanya ya. Kalau sensitifnya itu banyak ya, itu melibatkan lintas sektor ya mulai dari pembuatan jamban, ada pola asuh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Dinas PU penyediaan air bersihnya dan sebagainya. Kalau orang kesehatan ini kan melihat gimana air bersih layak atau tidak diminum sedangkan orang PU yang mengadakan sarana dan

prasarana air bersihnya”. (Wawancara dengan Petugas Gizi Puskesmas Bonjol 11 Desember 2020)

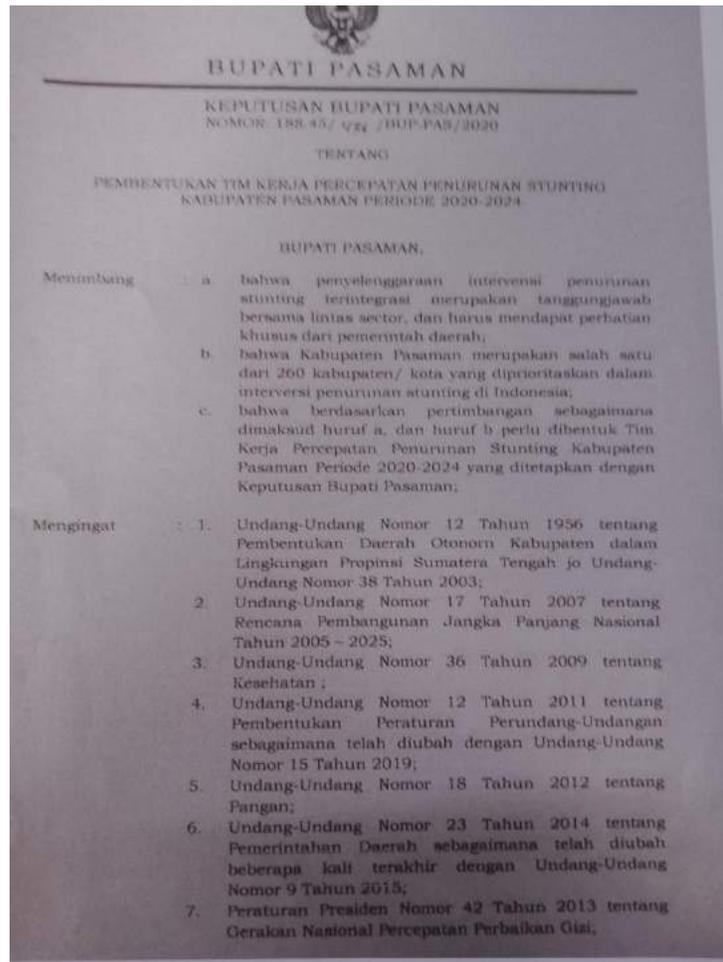
Kepala Sub Bidang Pemerintahan Bappeda Kabupaten Pasaman juga menyampaikan hal yang serupa dalam wawancara bersama peneliti:

“Untuk penanganan *stunting* itu tidak bisa habis di Dinas Kesehatan saja. Memang, yang paling banyak berkaitan dengan Dinas kesehatan, tapi nanti ada penanganan *stunting* ini contohnya penyuluhan remaja putri, pemberian tablet tambah darah itukan letaknya di Dinas pengendalian penduduk dan KB, bagaimana kita mengintervensi remaja tadi kegiatan tadi itu adanya di KB, kalau yang dinas pendidikan masalah Paud jadi intervensi anak Paud itu termasuk orang tuanya ada juga kelas *parenting* di paud itu, kemudian PU masalah air bersih dan segala kegiatan terkait air bersih itu ada di PU”. (Wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pemerintahan Bappeda Kabupaten Pasaman tanggal 06 Januari 2021)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut kita melihat bahwa dalam penanganan *stunting* memang sangat diperlukan adanya kerjasama antara lintas sektor karena *stunting* itu sendiri merupakan permasalahan yang tidak bisa ditangani oleh dinas kesehatan saja. Berikut merupakan gambar Keputusan Bupati Pasaman terkait kerjasama dalam penanggulangan *stunting*:



Gambar 5.3
Keputusan Bupati Tentang Kelompok Kerja Penanganan *Stunting* di Kabupaten Pasaman 2020-2024



Sumber: Dokumen Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman

Gambar 5.3 merupakan Keputusan Bupati Pasaman mengenai tim kerja penanggulangan *stunting* Tahun 2020-2024. Kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman dengan *stakeholder* lainnya dilandaskan oleh SK yang dikeluarkan oleh Bupati Pasaman dimana dibentuknya kelompok kerja yang beranggotakan seluruh instansi yang terlibat dalam penanganan *stunting*.

Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan sendiri biasanya Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman berperan sebagai penyedia data atau narasumber terhadap program atau kegiatan yang dilakukan oleh dinas lain yang terlibat dalam penanganan *stunting*. Salah satu contohnya Dinas Pekerjaan Umum (PU), dalam penanganan *stunting* Dinas PU berperan sebagai penyedia sarana prasarana terkait air bersih dan sanitasi. Disini Dinas Kesehatan berperan dalam memberikan data mengenai lokasi balita *stunting* yang akan dilakukan pembangunan jamban atau air bersih. Kemudian juga memberikan pengetahuan mengenai standar air layak pakai yang digunakan untuk masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Kepala Seksi Prasarana Lingkungan, Air Bersih, dan Sanitasi Dinas PU Kabupaten Pasaman kepada peneliti:

“Mereka yang menyediakan data nanti kita cocokan dengan kegiatan kita. Lokasi ini misalnya kecamatan lubuksikaping dimana lokasi lokus *stunting*nya. Nanti kita membangun air bersihnya disana gitu. Jadi intinya dinkes yang menyediakan data kita yang membangun sarana”. (Wawancara dengan Kasi Prasarana Lingkungan, Air Bersih, dan Sanitasi Dinas PU tanggal 16 Desember 2020)

Hal serupa juga disampaikan oleh Wali Nagari Koto Kaciak yang merupakan salah satu nagari lokus *stunting* terkait kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman berikut ini:

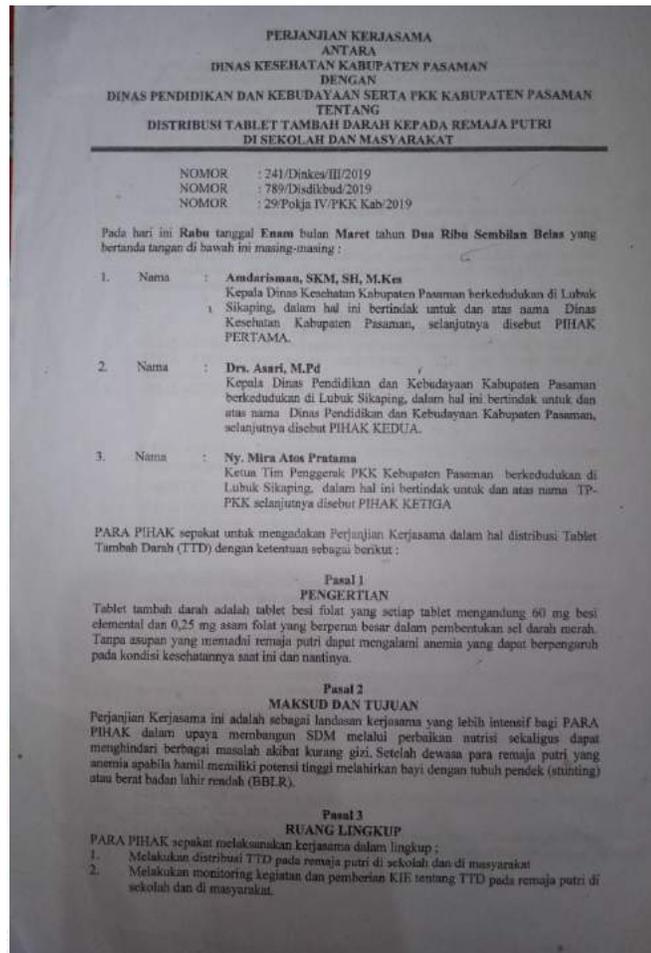
“Otomatis itu ada, seperti pelatihan kader untuk Posyandu Dinas Kesehatan kita minta dalam rangka memberikan arahan sehingga besoknya bisa mengantisipasi meningkatnya *stunting* di Koto Kaciak. Kemudian dalam gizi, menu makanan tambahannya datang dari Dinas Kesehatan”. (Wawancara dengan Wali Nagari Koto Kaciak Kabupaten Pasaman tanggal 07 Desember 2020)

Berdasarkan wawancara dengan Wali Nagari Koto Kaciak dapat dilihat bahwa bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman dengan pemerintahan nagari. Dinas Kesehatan berperan sebagai narasumber yang memberikan arahan dan pelatihan terhadap peningkatan kapasitas kader di nagari. Selain itu, Dinas Kesehatan berperan dalam penyusunan menu makan tambahan yang akan diberikan oleh pemerintah nagari kepada masyarakat yang menjadi kelompok sasaran kegiatan tersebut. Berikut ini juga merupakan salah satu bentuk kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman beserta Kelompok PKK Kabupaten Pasaman:



Gambar 5.4

Perjanjian Kerjasama Dinas Kesehatan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan beserta Kelompok PKK Kabupaten Pasaman



Sumber: Dokumen Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman

Gambar 5.4 merupakan perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan beserta Kelompok PKK di Kabupaten Pasaman. Kerjasama ini merupakan kerjasama dalam bentuk pendistribusian Tablet Tambah Darah untuk remaja putri dan masyarakat di Kabupaten Pasaman. Dalam kerjasama ini Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman berperan sebagai

penyedia tablet tambah darah yang akan diberikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan beserta Kelompok PKK sesuai dengan kebutuhan yang diajukan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman yang nantinya akan diberikan ke remaja putri di sekolah-sekolah dan masyarakat.

Kerjasama dalam penanganan *stunting* sudah terjalin cukup baik. Namun masih ada kendala yang dirasakan oleh Dinas Kesehatan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman:

“Komitmen dalam penanganan *stunting* itu yang kurang jadi itu kendala dalam penanganannya. Pas kami turun kelapangan nagari atau kecamatan lokus intervensi masih kurang fokus dalam menagani permasalahan *stunting* ini. Namun, kami Dinas Kesehatan sebagai penanganan intervensi spesifik tetap mendatangi nagari, tetap mendatangi kecamatan yang mana angka *stuntingnya* tinggi dalam intervensi masih belum adanya perubahan kita berikan dorongan, instruksi dan sebagainya”. (Wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman tanggal 13 November 2020)

Berdasarkan wawancara menunjukkan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman merasakan bahwa masih lemahnya komitmen terutama dari pihak nagari dan kecamatan lokus *stunting* dalam penanggulangan *stunting* ini. Oleh sebab itu, Dinas Kesehatan terus berupaya memberikan dorongan dan arahan terhadap nagari atau kecamatan dengan prevalensi *stunting* yang tinggi atau masih sedikit penurunan. Kendala kurangnya komitmen dalam kerjasama lintas sektor ini juga disampaikan oleh Kepala Sub Bidang Pemerintahan Bappeda Kabupaten Pasaman berikut ini:

“Nah, untuk komitmen itu sendiri yang susah, untuk pelaksanaan tugas intervensi mereka sudah bekerja sesuai tupoksinya kinerjanya sudah

baik. Namun dalam penyerahan laporan kepada kami selaku koordinator itu masih sering terlambat dan susah. Contoh kecil komitmen ini misalnya untuk data upload 8 aksi penanganan *stunting* itu kan melibatkan seluruh OPD terkait. Kadang kita sudah menyurati, menelpon OPD untuk mintak data namun tidak ditanggapi”.
(Wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pemerintahan Bappeda Kabupaten Pasaman tanggal 06 Januari 2021)

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pemerintahan Bappeda Kabupaten Pasaman dapat disimpulkan bahwa untuk kinerja semua instansi atau OPD yang terlibat dalam menangani *stunting* sudah bekerja dengan baik sesuai dengan tupoksi masing-masing. Namun, masih ada kendala yang dirasakan terhadap kerjasama ini lebih kepada kurangnya komitmen seperti masih terlambatnya OPD terkait dalam penyampaian laporan aksi penanganan *stunting*. Berdasarkan teori yang mempengaruhi kinerja menurut Mahmudi, kinerja juga dipengaruhi juga oleh Faktor Tim. Dalam penanganan *stunting* terkait faktor tim peneliti ingin melihat kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dengan *stakeholder* lainnya. Kerjasama dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Bupati terkait pembentukan kelompok kerja dalam penanganan *stunting* yang beranggotakan semua sektor yang terlibat. Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dengan dinas lainnya yaitu Dinas Kesehatan berperan sebagai penyedia data lokus atau balita *stunting*, kemudian sebagai narasumber dalam kegiatan yang dilakukan oleh dinas lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing dinas. Maka dapat peneliti simpulkan bahwa dalam penanganan *stunting* tidak bisa ditangani oleh sektor kesehatan saja perlunya kerjasama dengan lintas sektor. Namun dalam kerjasama yang dilakukan masih ditemui sedikit kendala yakni masih kurangnya komitmen dalam penanganan *stunting*.

5.3.2 Koordinasi

Menurut G.R Terry Koordinasi adalah suatu usaha sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Sedangkan menurut Handoko, koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang efisien⁴⁸.

Koordinasi menjadi bagian penting dalam organisasi karena dengan adanya koordinasi diharapkan dapat mencegah terjadinya kekacauan, kececokan, dan kekembaran atau kekosongan pekerjaan. Kemudian, supaya semua tugas, kegiatan, dan pekerjaan terintegrasi pada sasaran yang diinginkan⁴⁹. Penanganan *stunting* di Kabupaten Pasaman tentu harus memiliki koordinasi yang baik. Menimbang Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman juga bekerjasama dengan sektor lain. Dalam koordinasi terkait penanganan *stunting*, koordinasi yang dilakukan sudah berjalan cukup baik. Hal ini seperti yang disampaikan oleh kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman:

“Alhamdulillah komunikasi kita dengan lintas sektoral cukup bagus ya, bahkan kita sudah membentuk group Whatsaap (WA) dan disitupun terbuka informasi, berbagi informasi ya dan berbagi kiat-kiat. Alhamdulillah koordinasi kita cukup bagus”. (Wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman tanggal 13 November 2020)

⁴⁸ Mardalena, op.cit., hlm 62-63

⁴⁹ Ibid., hlm 72-73

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Seksi Prasarana Lingkungan, Air Bersih, dan Sanitasi Dinas PU

“Paling rapat nanti gimana penangannya, biasanya bisa di Bappeda atau Dinas Kesehatan. Jadwalnya itu tergantung undangan dari Dinas Kesehatan. Kita punya juga grub *whatsapp*. Terkait misalnya rapat-rapat. Cara koordinasinya salah satunya melalui WA ini. Seluruh dinas terkait penanganan *stunting* ada di grub ini.” (Kepala Seksi Prasarana Lingkungan, Air Bersih, dan Sanitasi Dinas PU tanggal 16 Desember 2020)

Begitupun dengan Kepala Sub Bidang Pemerintahan Bappeda Kabupaten Pasaman juga menyampaikan pernyataan yang hampir serupa berikut ini:

“Kalau koordinasi itu kita selalu mengadakan rapat, itu biasanya dilakukan di Dinas Kesehatan karena penganggarannya berasal dari Dinas Kesehatan. Untuk waktunya tidak ada ketentuannya ya. Biasanya yang paling banyak yang dibahas pelaksanaan delapan aksi penanganan *stunting*”. (Kepala Sub Bidang Pemerintahan Bidang Sosial Budaya Bappeda Kabupaten Pasaman tanggal 06 Januari 2021)

Berdasarkan wawancara tersebut koordinasi yang dilakukan dengan lintas sektor juga sudah cukup baik. Dimana juga ada grub *whatsapp* sebagai media berkomunikasi terkait berbagi informasi maupun kiat-kiat dalam penanganan *stunting* dengan berbagai pihak yang terkait. Kemudian bentuk koordinasi lainnya dalam rangka penanggulangan *stunting* dilakukan dalam bentuk rapat-rapat koordinasi dan juga laporan yang diberikan oleh Puskesmas setiap bulannya. Namun, pelaporan dari pihak Puskesmas masih memiliki kendala yaitu kurangnya ketepatan waktu pihak Puskesmas dalam penyampaian laporan. Hal ini disampaikan juga oleh Kepala Seksi Gizi dan Kesga Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman:

“Melalui koordinasi langsung dan tidak langsung. Langsung misalnya dengan rapat yang kita adakan. Kalau tidak langsung ya seperti laporan setiap bulannya. Untuk kendala dalam koordinasi ini palingan kurangnya ketepatan waktu dalam penyampaian laporan oleh Puskesmas ya, tapi kita ada berusaha selalu mengingatkan kembali setiap Puskesmas itu untuk mengirimkan laporan tepat waktu”. (Wawancara dengan Kepala Seksi Gizi dan Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman tanggal 16 November 2020)

Terlambatnya pengiriman laporan disebabkan oleh adanya kendala dilapangan dan banyaknya kegiatan yang ada di Puskesmas. Sehingga terkadang membuat pihak Puskesmas terlambatnya dalam mengolah data yang berimplikasi pada terlambat juga dalam pengiriman laporan. Hal ini disampaikan oleh Petugas Gizi Puskesmas Bonjol:

“Untuk tepat waktu terkadang ada yang tidak tepat waktu ya karena banyak kendala di lapangan yang mebuat tidak tepat waktu, misalnya dalam pengolahan data, ibuk kan sekarang sedang mengolah data ini, aplikasi *stunting* ini ada aplikasi EEPGBM namanya. Karena banyaknya kegiatan di Puskesmas Terkdang untuk pengolahan datanya juga terkendala sehingga pelaporan juga menjadi terlambat”. (Wawancara dengan Petugas Gizi Puskesmas Bonjol tanggal 11 Desember 2020)

Dari berbagai hasil wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa untuk koordinasi penanganan *stunting* di Kabupaten Pasaman dilakukan dalam bentuk koordinasi langsung maupun tidak langsung. Koordinasi langsung salah satunya dalam bentuk rapat-rapat yang diadakan setiap tahunnya. Berikut adalah gambar rapat koordinasi yang dilakukan pada tahun 2019 dan 2020:

Gambar 5.5

Rapat Koordinasi Penanganan *Stunting* di Kabupaten Pasaman Tahun 2019 dan 2020



Sumber: Dokumentasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman

Gambar 5.5 merupakan rapat koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan pada Tahun 2019 dan 2020. Rapat koordinasi penanganan *stunting* terdiri dari rapat koordinasi tingkat nagari, rapat koordinasi tingkat kecamatan dan rapat koordinasi tingkat kabupaten. Pada Tahun 2019 rapat koordinasi dilakukan sekali setahun baik tingkat nagari, kecamatan, dan kabupaten. Sedangkan pada Tahun 2020 dalam perencanaannya dilakukan menjadi per triwulan. Namun, hampir tidak bisa terlaksana sesuai jadwal karena situasi kondisi yang belum memadai karena adanya *covid 19* bahkan bisa tidak terlaksana semuanya. Hal ini disampaikan oleh Kasi Gizi dan Kesga Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman:

“Tergantung pendanaan ya. Kalau tahun 2019 itu rapat koordinasi dilakukan sekali setahun nagari, kecamatan, kabupaten sekali. Kalau tahun 2020 perencanaannya per triwulan tapi karena situasi covid membuat rapat koordinasi menjadi terhambat, molor bahkan tidak terlaksana yang terlaksana baru satu kali”. (Wawancara dengan Kepala Seksi Gizi dan Keluarga tanggal 16 November 2020)

Menurut Mardalena, koordinasi diperlukan supaya semua tugas, kegiatan, dan pekerjaan terintegrasi pada sasaran yang diinginkan. Koordinasi dalam penanganan *stunting* di Kabupaten Pasaman sudah cukup baik. Koordinasi dilakukan salah satunya dengan adanya grup *whatsapp* tim kerja penanganan *stunting*, dimana semua aktor terlibat dapat berkomunikasi mengenai baik itu kendala atau kiat-kiat dalam penanganan *stunting*. Kemudian adanya pertemuan-pertemuan berkala, namun karena situasi kondisi saat ini yaitu adanya *Covid 19* membuat beberapa kegiatan koordinasi menjadi terhambat dan tertunda sehingga tidak sesuai dengan yang direncanakan. Selain itu masih adanya keterlambatan pengiriman laporan oleh pihak Puskesmas.

Menurut teori Mahmudi, dimana kinerja organisasi juga dilihat melalui Faktor tim. Penanganan *stunting* tidak terlepas dengan adanya kerjasama yang dilakukan dengan berbagai OPD. Kerjasama dilakukan berdasarkan Keputusan Bupati Pasaman terkait pembentukan kelompok kerja penanganan *stunting* yang beranggotakan semua instansi/OPD yang terlibat dalam penanganan *stunting*. Namun dalam kerjasama masih memiliki kendala dimana masing kurangnya komitmen *stakeholder* terutama kecamatan atau nagari lokus *stunting*. Kemudian masih kurangnya komitmen atau kedisiplinan *stakeholder* yakni dinas-dinas yang terlibat dalam penyampaian laporan secara tepat waktu. Selanjutnya koordinasi, penanganan *stunting* koordinasi dilakukan

dengan koordinasi langsung. Pelaksanaan koordinasi sendiri masih memiliki kendala terutama dalam rapat koordinasi yang telah direncanakan dimana dengan situasi *covid* membuat rapat terlambat bahkan tidak bisa diadakan.

5.4 Faktor Sistem

Sistem merupakan suatu kesatuan yang utuh dari suatu rangkaian yang saling kait mengait satu sama lain. Sistem adalah suatu susunan atau rakitan komponen atau bagian-bagiannya yang membentuk suatu kesatuan yang utuh, dengan sifat saling tergantung, saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Susunan dari komponen atau rakitan tersebut membentuk sistem, demikian eratnya kerusakan salah satu komponen akan mengakibatkan terganggunya seluruh sistem⁵⁰.

5.4.1 Sistem Kerja

Sistem kerja merupakan susunan tata cara kerja dengan prosedur menjadi satu sehingga membentuk pola tertentu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Sistem kerja dalam menanggulangi *stunting* oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman dilakukan berdasarkan juknis penanganan *stunting* dan tupoksi masing-masing dinas. Hal ini berdasarkan wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman sebagai berikut:

“Dalam penanganan *stunting* ini kami tidak memiliki SOP ya tapi juknis, juknis bisa di *download* di internet *kok*. Penanganan *stunting* tidak hanya Dinas Kesehatan kan jadi kami berkerja sesuai tupoksi dan

⁵⁰ Naomi Narda, op.cit., hlm 145

juknis kami. Mereka bekerja sesuai tupoksinya dan mereka bekerja sesuai dengan juknisnya masing-masing. Misalnya PU dia bekerja sesuai juknisnya entah itu pamsimas, air bersih atau jamban lalu nanti Dinas Sosial misalnya bergerak dirumah layak huni. Dinas Pangan, dinas lain juga demikian. Jadi sistem kerja kita dalam penanganan *stunting* ini baik kami selaku Dinas Kesehatan atau dinas lain bekerja berpedoman kepada juknis yang telah di tetapkan”. (Wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman tanggal 13 November 2020)

Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Seksi Gizi dan Kesehatan

Keluarga Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman berikut ini:

“Untuk SOP adanya di Puskesmas ya, kalau disini untuk penanganan *stunting* bekerja berdasarkan juknis ada namanya pedoman pelaksanaan intervensi penurunan *stunting* terintegrasi di kabupaten/kota. Jadi kami bekerja dalam menanggulangi *stunting* ya berdasarkan juknis ini. Disitu sudah dijelaskan apa saja yang harus kita lakukan juga ada dinas apa saja yang berperan dalam menangani *stunting*.” (Wawancara dengan Kepala Seksi Gizi dan Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman tanggal 16 November 2020)

Berdasarkan wawancara dapat kita simpulkan dalam penanganan *stunting* Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman tidak memiliki SOP melainkan juknis. Maka dalam pelaksanaan setiap kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman berpedoman kepada juknis dan tupoksi yang ada. Berikut adalah pedoman teknis dalam penanganan *stunting*:



Gambar 5.6
Pedoman Pelaksanaan Penanganan *Stunting* Kab/Kota Tahun 2018



Sumber: <https://www.google.co/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://tmpk2.go.id/filemanager/files/rakonis>

Gambar 5.6 merupakan petunjuk atau pedoman teknis yang menjadi acuan Dinas Kesehatan kabupaten Pasaman. Begitupun dengan dinas lainnya yang berperan dalam menanggulangi *stunting* juga berpedoman pada pedoman teknis tersebut dan tupoksi masing-masing dinas. Di dalam pedoman teknis ini juga telah dipetakan OPD maupun kegiatan yang harus dilakukan oleh masing-masing OPD dalam penanganan *stunting*. Berikut adalah pemetaan OPD dan kegiatan yang dilakukan terkait penurunan *stunting* berdasarkan juknis penurunan *stunting* kabupaten/kota:

Tabel 5.3
Pemetaan OPD dan Kegiatan dalam Penurunan *Stunting* Kabupaten/Kota

| No | Instansi | Kegiatan Terkait Penurunan <i>Stunting</i> |
|----|--|---|
| 1 | Kesehatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dalam peningkatan status gizi masyarakat 2. Pembinaan dalam peningkatan pengetahuan gizi masyarakat 3. Pembinaan pencegahan stunting 4. Pelaksanaan strategi promosi kesehatan 5. Peningkatan surveilans gizi 6. Penguatan intervensi suplementasi gizi pada ibu hamil dan balita 7. Penyediaan Makanan Tambahan bagi ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) 8. Penyediaan Makanan Tambahan Bagi Balita Kekurangan gizi 9. Suplementasi gizi mikro 10. Pembinaan dalam peningkatan persalinan di fasilitas layanan kesehatan 11. Pembinaan pelaksanaan STBM 12. Layanan pengendalian penyakit filariasis dan Kecacingan |
| 2 | Pertanian dan Ketahanan Pangan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) 2. Kawasan Mandiri Pangan |
| 3 | Kelautan dan Perikanan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemasaran dan promosi hasil laut dan perikanan |
| 4 | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sanitasi Pedesaan Padat Karya 2. PAMSIMAS/ SPAM Pedesaan |
| 5 | Pendidikan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan PAUD 2. Kelas Parenting 3. Penguatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) 4. Bantuan banitasi sekolah |
| 6 | Keluarga Berencana | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan promosi pengasuhan 1.000 HPK |
| 7 | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi gizi seimbang, ASI, Pembatasan GGL, Kesehatan reproduksi, dan bahaya merokok bagi anak dan keluarga |
| 8 | Sosial | <ol style="list-style-type: none"> 1. Family Development Session (FDS) Pada PKH 2. KPM yang mendapatkan bantuan sosial pangan |
| 9 | Agama | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan perkawinan- pra nikah 2. Bimbingan keluarga sakinah |
| 10 | Kependudukan dan Catatan Sipil | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencatatan sipil (akta Kelahiran, NIK) |
| 11 | Perindustrian | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan SNI wajib produk industri hasil tanaman pangan |

| | | |
|----|--------------------------------|---|
| 12 | Perdagangan | 1. Pengawasan barang beredar dan jasa sesuai ketentuan |
| 13 | Pengawasan Obat Dan Makanan | 3 Pengawasan produk pangan fortifikasi 4 Desa pangan aman |
| 14 | Komunikasi dan Informatika | 1. Kampanye nasional terkait <i>stunting</i> |
| 15 | Pemberdayaan Masyarakat Desa | 1. Pemanfaatan dana desa |
| 16 | Perencanaan Pembangunan Daerah | 1. Koordinasi penganggaran program percepatan penurunan <i>stunting</i> 2. Penguatan koordinasi perencanaan percepatan penurunan <i>stunting</i> 3. Advokasi penerapakan kebijakan percepatan penurunan <i>stunting</i> |

Sumber: Pedoman Pelaksanaan Intervensi *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten/Kota

Dari Tabel 5.3 dapat kita lihat di dalam juknis penanganan *stunting* sudah adanya pemetaan OPD yang bertugas menangani *stunting* dan kegiatan apa aja yang harus dilakukan. Oleh sebab itu, dalam melakukan intervensi *stunting* para OPD terkait menyusun dan melaksanakan kegiatan berpedoman pada kegiatan yang telah ada di juknis tersebut.

Berdasarkan teori yang mempengaruhi kinerja yang dikemukakan oleh Mahmudi yakni faktor sistem dimana meliputi sistem kerja. sistem kerja dalam penanganan *stunting* di Kabupaten Pasaman Dinas Kesehatan berpedoman kepada juknis yaitu Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi Tingkat Kabupaten/Kota yang dikeluarkan oleh dikeluarkan oleh Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional. Selain itu Dinas Kesehatan juga berpedoman kepada tupoksi dinas sendiri. Sama halnya dengan dinas lainnya juga bekerja sesuai juknis dan tupoksi masing-masing.

5.4.2 Fasilitas Kerja

Fasilitas berarti alat atau bentuk fisik (sarana dan prasarana). Jadi fasilitas kerja dapat kita artikan sebagai segala peralatan atau sarana dan prasarana yang menunjang proses pelaksanaan pekerjaan dengan baik. Sehingga, ketersediaan kelengkapan fasilitas kerja ini ikut andil dalam pencapaian tujuan organisasi. Fasilitas kerja yang digunakan dalam penanggulangan *stunting* oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman masih memiliki persoalan. Salah satu persoalannya yaitu masih terbatasnya peralatan yang digunakan dalam pengukuran anak *stunting* yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman sebagai berikut:

“Memang masih kurang memadai ya, rekomendasi WHO kita tidak lagi memakai timbangan tetapi sudah memakai antropometri kit, idealnya semua Posyandu di Kabupaten Pasaman alat ukur timbangan tinggi badan timbangan berat badan. Nyatanya kita di Pasaman belum seluruhnya Posyandu kita yang mempunyai alat antropometri ...Pertama usaha yang kita lakukan, kita menyadari ya kita kurang memadai, kita memohon bantuan dari pusat untuk permohonan anggaran untuk pengadaan Antropometri *Alhamdulillah* pusat sudah memberikan tapi itu tetap masih belum mencukupi. Kemudian kiat-kiat kita yang kita lakukan untuk mengantisipasi kekurangan yang tadi, hari Posyandunya yang kita siasati. Saat ini Antropometri di Puskesmas ada yang 5, ada yang 7, ada yang 10. *Pas* hari Posyandu kita sesuaikan dengan alat Antropometri yang ada Puskesmas. Misalnya ada 5 yang ada di Puskesmas tersebut, ya maksimal Posyandu yang *pas* hari itu ada 5”. (Wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman tanggal 13 November 2020)

Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Seksi Gizi dan Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman sebagai berikut:

“Fasilitas cukup memadai cuman terkendala pada alat pengukuran, yang mungkin baru seperempat ya dari jumlah Posyandu kita ya. Jadi dalam pemakaiannya kita siasati harinya ya. Karena harganya mahal ya jadi belum bisa kita mengadakan satu per Posyandu. Tapi kita juga ada mencoba meminta bantuan kepada nagari untuk pengadaan kepada mereka berapa sanggup mereka ya”. (Wawancara dengan Kepala Seksi Gizi dan Keluarga tanggal 16 November 2020)

Berdasarkan wawancara tersebut menunjukkan bahwa dalam pengukuran anak *stunting* memiliki alat pengukuran yang direkomendasikan oleh WHO yaitu Antropometri kit. Idealnya Antropometri Kit ini harus dimiliki dan ditempatkan di setiap Posyandu. Namun, di Kabupaten Pasaman sendiri kelengkapan alat ini masih belum mencukupi karena belum tersedianya kecukupan dana dalam pengadaannya. Sehingga perlunya upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan untuk mengatasi persoalan ini.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman mulai dari permintaan bantuan kepada pemerintah pusat maupun nagari namun tetap saja masih belum mencukupi. Selanjutnya, hal yang dilakukan adalah mensiasati hari Posyandu. Dimana banyaknya Posyandu yang dilakukan pada hari itu disesuaikan dengan jumlah alat Antropometri yang ada. Hal ini dibenarkan oleh Petugas Gizi Simpang Tonang dalam wawancara yang peneliti lakukan:

“Kalo kami disini untuk antropometri kit udah ada, cuman kami baru dapat tujuh set sedangkan Posyandu disini ada 18 Posyandu. Jadi Puskesmas yang bawa-bawa pas turun lapangan. Cuman 2 jorong terjauh kami tinggalkan disitu”. (Wawancara dengan Petugas Gizi Puskesmas Simpang Tonang tanggal 24 November 2020)

Berdasarkan wawancara dengan salah satu Petugas Gizi Simpang Tonang ini menunjukkan bahwa memang benar bahwa ketersediaan Antropometri ini masih jauh dari jumlah ketersediaan yang seharusnya. Antropometri yang ada sendiri karena keterbatasan jumlahnya ini tidak bisa ditempatkan di Posyandu. Ketersediaannya masih ditempatkan di Puskesmas. Jadi saat Posyandu atau turun lapangan Puskesmas yang membawa seluruh Antropometri tersebut. Untuk daerah yang dirasakan sangat jauh baru ditempatkan di Posyandu tersebut. Hal senada juga disampaikan oleh salah satu Petugas Gizi Puskesmas Bonjol sebagai berikut:

“Kalau sarana prasarana kita masih kurang, seperti di Puskesmas bonjol ini, alat ukur yang ada cuma delapan. Jadi nanti pas penimbangan massal Februari dan Agustus seharusnya dia ada perposyandu ini, misalnya ada balita baru bisa langsung dilakukan pengukuran gitu ya, tapi karena peralatan tidak tersedia di Posyandu secara keseluruhannya jadi tidak bisa. Untuk alat ini jadi kita masih *standby* di Puskesmas ya belum bisa disediakan atau ditempatkan di Posyandu ya, pas penimbangan atau pengukuran baru kita bawa ke Posyandu”. (Wawancara dengan Petugas Gizi Puskesmas Bonjol tanggal 11 Desember 2020)

Berdasarkan wawancara dengan Petugas Gizi Puskesmas Bonjol dapat kita simpulkan bahwa memang sarana dan prasarana masih belum mencukupi. Seharusnya alat Antropometri itu ditempatkan per Posyandu. Karena ketersediaannya di masih sedikit alat Antropometri yang ada masih ditempatkan di Puskesmas. Sehingga pada saat adanya balita baru belum bisa langsung dilakukan pengukuran harus menunggu Puskesmas turun lapangan dulu. Hal yang senada juga disampaikan oleh Kader Posyandu Nagari Aia Manggih:

“Untuk peralatan atau perlengkapan yang digunakan di Posyandu itu ada timbangan badan, pengukur tinggi badan, meja juga sudah mencukupi, cuman ada satu alat lagi Antropometri kit namanya itu yang belum”. (Wawancara dengan kader posyandu Nagari Aia Manggih tanggal 20 Februari 2020)

Berikut dapat dilihat ketersediaan alat Antropometri Kit perpuskesmas di Kabupaten Pasaman sebagai berikut:

Tabel 5.4
Jumlah Distribusi Antropometri Kit Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Tahun 2020

| No | PUSKESMAS | JUMLAH POSYANDU | ANTROPO METERI |
|----|--------------------------|-----------------|----------------|
| 1 | Puskesmas Ladang Panjang | 38 | 5 |
| 2 | Puskesmas Simpati | 26 | 5 |
| 3 | Puskesmas Kumpulan | 24 | 6 |
| 4 | Puskesmas Bonjol | 22 | 6 |
| 5 | Puskesmas Lubuksikaping | 42 | 6 |
| 6 | Puskesmas Sundatar | 31 | 6 |
| 7 | Puskesmas Pegang Baru | 26 | 6 |
| 8 | Puskesmas Kuamang | 16 | 6 |
| 9 | Puskesmas Tapus | 31 | 5 |
| 10 | Puskesmas Lansat Kadap | 38 | 6 |
| 11 | Puskesmas Rao | 30 | 6 |
| 12 | Puskesmas Koto Rajo | 24 | 6 |
| 13 | Puskesmas Pintu Gadang | 15 | 5 |
| 14 | Puskesmas Silayang | 22 | 5 |
| 15 | Puskesmas Cubadak | 31 | 6 |
| 16 | Puskesmas Simpang Tonang | 15 | 6 |
| | Jumlah | 430 | 91 |

Sumber: Dokumen Kazi Gizi dan Kesga Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman 2020

Berdasarkan Tabel 5.4 dapat kita lihat bahwa ketersediaan alat Antropometri belum sampai seperempat dari jumlah Posyandu yang ada di Kabupaten Pasaman yakni dari 430 jumlah Posyandu baru terpenuhi sebanyak 91 buah. Idealnya alat Antropometri seharusnya ada satu per Posyandu.

Berdasarkan teori Mahmudi yaitu faktor sistem selain tim kerja juga di pengaruhi oleh fasilitas kerja. Fasilitas dalam penanganan *stunting* sama halnya dengan fasilitas kegiatan gizi lainnya yakni berupa timbangan badan, lalu alat ukur tinggi badan dan juga alat Antropometri Kit. Namun ketersediaan fasilitas kerja dalam penanganan *stunting* di Kabupaten Pasaman masih belum mencukupi yaitu masih belum tersedianya alat antropometri kit satu per Posyandu. Karena kekurangan ini penggunaan antropometri ini harus digilirkan. Sehingga ketika adanya penimbangan atau pengukuran masal tidak bisa langsung bisa dilaksanakan secara cepat oleh Posyandu karena harus menunggu bergiliran. Kemudian kekurangan fasilitas ini juga akan menyebabkan pengentrian data ataupun pelaporan karena lambatnya dalam proses pengukuran balita.

5.4.3 Proses Organisasi

Proses organisasi adalah aktivitas-aktivitas utama yang dilakukan dalam suatu organisasi. Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman proses organisasi mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai evaluasi terkait penanganan *stunting* semua itu ditetapkan dan dilakukan berdasarkan pada juknis penanganan *stunting*. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman dalam wawancara bersama peneliti sebagai berikut:

“Semua perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai evaluasi semua itu kita lakukan berdasarkan juknis”. (Wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman tanggal 13 November 2020)

Perencanaan dalam program intervensi *stunting* direncanakan dengan melihat besaran prevalensi setiap daerah dan juga ketersediaan dana untuk intervensi dengan berpedoman pada kebijakan dan juknis penanganan *stunting*. Pengorganisasian dalam penanganan *stunting* juga sudah dipetakan oleh juknis dan kemudian ditetapkan kelompok kerja oleh Bupati Kabupaten Pasaman yang mana sudah dipetakan di dalam juknis penanganan *stunting*. Begitu juga dalam pelaksanaan sampai evaluasi semuanya berpedoman pada juknis. Hal ini disampaikan oleh Kepala Seksi Gizi dan Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman berikut ini:

“Perencanaan dalam program dalam intervensi *stunting* berdasarkan besaran prevalensi, lokasi sebaran kasus, kemudian ketersediaan dana dan kita berpedoman pada kebijakan dan juknis yang dikeluarkan oleh kementerian terkait. Kalau untuk pengorganisasiannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pasaman tentang kelompok kerja yang beranggotakan OPD terkait intervensi *stunting*. Kemudian dalam pelaksanaan kita Dinas Kesehatan tentu menjalankan program atau kegiatan yang sesuai dengan tupoksi dan juknis kita, umumnya semuanya sampai evaluasi sudah ada juknisnya jadi kita lakukan semuanya sesuai juknis tadi...semuanya berjalan dengan baik ya, cuman dalam pelaksanaan program ya adalah kendala-kendala dilapangan ya”. (Wawancara dengan Kepala Seksi Gizi dan Keluarga tanggal 16 November 2020)

Proses pelaksanaan program atau kegiatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman saat ini masih memiliki kendala. Salah satu Indikator program untuk menurunkan *stunting* di Kabupaten Pasaman yaitu adanya penimbangan balita. Kegiatan ini dilakukan untuk melihat perkembangan pertumbuhan si balita yang biasanya dilaksanakan di Posyandu. Namun, kendalanya adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk ke posyandu, masyarakat masih menganggap sepele

penimbangan atau pengukuran balita. Hal ini dapat dilihat dari persentase balita ditimbang per Puskesmas Tahun 2019 di Kabupaten Pasaman:

Tabel 5.5
Persentase Balita Ditimbang Per Puskesmas Tahun 2019

| No. | Puskesmas | Jumlah balita | Jumlah Balita Ditimbang | Persentase |
|-----|--------------------------|---------------|-------------------------|------------|
| 1. | Puskesmas Ladang Panjang | 2692 | 2123 | 78.9 |
| 2. | Puskesmas Simpati | 1003 | 786 | 78.4 |
| 3. | Puskesmas Kumpulan | 992 | 955 | 96.3 |
| 4. | Puskesmas Bonjol | 958 | 825 | 86.1 |
| 5. | Puskesmas Lubuksikaping | 2189 | 1747 | 79.8 |
| 6. | Puskesmas Sundatar | 1809 | 1559 | 86.2 |
| 7. | Puskesmas Pegang Baru | 1911 | 1432 | 74.9 |
| 8. | Puskesmas Kuamang | 872 | 783 | 89.8 |
| 9. | Puskesmas Tapus | 2363 | 1722 | 72.9 |
| 10. | Puskesmas Lansat Kadap | 1690 | 1291 | 76.4 |
| 11. | Puskesmas Rao | 2217 | 1868 | 84.3 |
| 12. | Puskesmas Koto Rajo | 910 | 856 | 94.1 |
| 13. | Puskesmas Pintu Gadang | 878 | 826 | 94.0 |
| 14. | Puskesmas Silayang | 801 | 629 | 78.5 |
| 15. | Puskesmas Cubadak | 1193 | 1110 | 93.0 |
| 16. | Puskesmas Simpang Tonang | 875 | 808 | 92.4 |

| | | | |
|--------|-------|-------|------|
| Jumlah | 23351 | 19318 | 82,7 |
|--------|-------|-------|------|

Sumber: Laporan Kinerja Seksi Gizi dan Kesehatan Keluarga 2019

Berdasarkan Tabel 5.5 menunjukkan dari 23.351 jumlah balita hanya 19.318 yang melakukan penimbangan. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak orang tua tidak membawa anaknya ke Posyandu. Hal ini disebabkan oleh kebanyakan masyarakat berpikir bahwa melakukan penimbangan tidak terlalu penting. Hal ini sesuai dengan wawancara peneliti dengan Petugas Gizi Puskesmas Bonjol

“Nah itu yang belum, belum semua masyarakat memahami, *ah* nimbang-nimbang aja pikiran mereka, ya itu masyarakat belum memahami perlunya gitu ya, karena dia lihat keadaan anak-anak tadi dia bisa main-main seperti yang ibuk bilang tadi, dia bisa berlari jadi mereka menganggap *ngak* perlu dibawa ke Posyandu gitu ya mereka menganggap anak mereka sehat-sehat aja tidak terlalu perlu pergi ke Posyandu”. (Wawancara dengan Petugas Gizi Puskesmas Bonjol tanggal 11 Desember 2020)

Hal senada juga disampaikan oleh Wali Nagari Koto Kaciak Kabupaten Pasaman:

“...kemudian kehadiran Posyandu, masyarakat persentasenya masih sebagian kecil datang ke Posyandu, mereka tidak menganggap begitu penting. Itu adalah salah satu kendala memperkecil jumlah balita *stunting* atau masalah gizi disini”. (Wawancara dengan Wali Nagari Koto Kaciak tanggal 07 Desember 2020)

Hal ini juga disampaikan oleh salah satu Kader Posyandu Nagari Aia Manggih yang merupakan salah Nagari lokus *stunting* kepada peneliti:

“Kadang ada juga yang mencapai target, kadang gak sampai 50 persen yang datang. Ada yang katanya dilarang suaminya pergi Posyandu. Kan biasanya anak habis imunisasi malamnya rewel, lalu suaminya marah *gak* usah ke Posyandu lagi, ada juga yang malas. Ya kita gimana memaksa juga gak bisa nanti berantem pula sama suami gara-gara Posyandu... sosialisasi ada kita lakukan setiap kali Posyandu

mengenai sadar gizi dan lainnya tapi jarang mereka mau dengerin, kan kita sama-sama masyarakatkan jadi *gak* terlalu dianggap penting oleh masyarakat menurutnya mungkin kita kurang ilmu kali ya. Tapi sekarang udah lumayan banyak yang datang, soalnya kebanyakan yang memiliki balita ibuk-ibuk PKH, mereka diharuskan untuk datang Posyandu, kalau *ngak* nanti *ngak* dapat uang PKH, jadi sekarang lumayan banyaklah yang datang posyandu”. (Wawancara dengan Kader posyandu Nagari Aia Manggih tanggal 20 Februari 2021)

Hal yang serupa juga disampaikan oleh salah satu Kader Posyandu

Nagari Koto Kaciak yang merupakan nagari lokus *stunting* sebagai berikut:

“Sekarang ada lumayan banyak yang datang ke Posyandu. Tapi ada juga sekeluarga yang tidak pernah datang. Kami terus yang datang kerumah mereka. Nanti akan disuruh buat surat perjanjian lagi untuk dilaporkan keatas. Mereka tidak datang katanya karena suaminya *ngak* ngebolehkan. Untuk masyarakat lain alasan mereka *ngak* datang beragam-ragam ya. Ada yang pergi ke sawah, anaknya sedang tidur, lupa, bermacam-macam”. (Wawancara dengan Kader Posyandu Nagari Koto Kaciak tanggal 26 Februari 2021)

Berdasarkan wawancara dapat kita simpulkan keinginan masyarakat untuk datang ke Posyandu memang masih minim. Kemudian pengetahuan pentingnya pergi Posyandu juga masih kurang. Namun pada saat ini sudah ada sedikit peningkatan yang datang ke Posyandu. Karena adanya *punishment* yang akan diterima terutama masyarakat kelompok sasaran yang juga merupakan anggota Program Keluarga Harapan (PKH). Membuat masyarakat wajib untuk mengikuti Posyandu. Pencapaian indikator program memang masih ada yang belum mencapai target.

Berdasarkan faktor sistem yang dikemukakan oleh Mahmudi, selain sistem kerja dan fasilitas kerja. Faktor sistem juga meliputi proses organisasi. Proses organisasi dalam penanganan *stunting* di Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman dilihat dari

aktivitas-aktivitas pokok mulai dari perencanaan sampai evaluasi. Untuk tahap perencanaan sampai evaluasi sendiri dilakukan berpedoman pada juknis. Namun dalam proses tersebut masih terkendala dalam pelaksanaan kegiatan. Dimana masih ada beberapa target kegiatan yang belum mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini salah satunya dikarenakan masih kurangnya pemahaman masyarakat dan kemauan dalam pergi ke Posyandu. Masyarakat masih berpikir ketika anak mereka terlihat sehat tidak terlalu memerlukan untuk datang ke Posyandu. Maka dapat peneliti simpulkan bahwa dalam pelaksanaan program atau kegiatan Dinas Kesehatan masih memiliki kendala sehingga target yang telah ditetapkan ada yang belum tercapai.

5.4.4 Budaya kinerja

Menurut Robin, budaya merupakan makna dan keyakinan bersama yang dianut oleh para anggota organisasi yang menentukan sebagian besar cara mereka bertindak. Budaya dapat berkembang karena adanya kesepakatan seluruh individu dan karena adanya tekanan dari oknum-oknum yang dituakan di dalam suatu komunitas. Akibatnya budaya yang telah ditetapkan menjadi kebiasaan⁵¹. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi pegawai atau pekerja dalam melakukan tugas pekerjaannya juga dipengaruhi oleh budaya yang ada di dalam organisasi mereka bekerja. Budaya kerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman lebih menekankan pada kerjasama. Hal ini

⁵¹ Duha, Timotius, op.cit. hal 271

sesuai dengan yang disampaikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman:

“Budaya kita lebih bekerjasama ya, sebisa mungkin kita bersama-sama meningkatkan kesehatan masyarakat di Kabupaten Pasaman ini dan bekerja sebaik mungkin melaksanakan tugas tanggung jawab kita”. (*Wawancara dengan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat tanggal 15 Desember 2020*)

Selain adanya nilai kerjasama yang menjadi pedoman, nilai kekeluargaan juga menjadi budaya kerja yang diterapkan, dengan adanya nilai kekeluargaan dapat membuat suasana dalam bekerja menjadi lebih nyaman sehingga terhindar dari konflik atau rasa tidak nyaman dalam bekerja. Hal ini disampaikan oleh Kepala Seksi Gizi dan Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman:

“Kalau ibuk melihat selama ini ya, kultur atau budaya kerja yang ada di dinas kesehatan ini lebih ke kekeluargaan ya terus kebersamaan. Kami di bagian gizi biasanya untuk meningkatkan rasa kebersamaan kami terkadang ada acara makan bersama gitu. Kalau semuanya merasa lebih dekat atau kebersamaanya lebih gitu ya, kan nanti dalam bekerja juga aman dan nyaman, menyelesaikan pekerjaan lebih mudah soalnya *gak* ada konflik. Ada kendala bisa diselesaikan bersama gitu ya”. (*Wawancara dengan Kepala Seksi Gizi dan Keluarga tanggal 16 November 2020*)

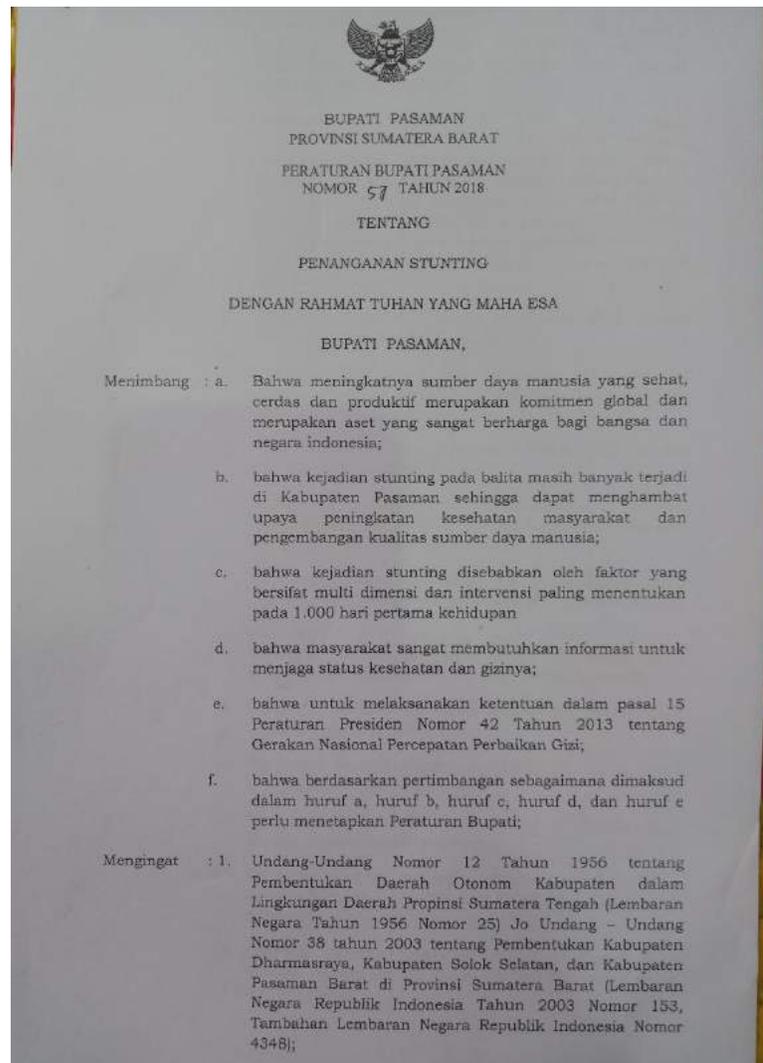
Berdasarkan teori Mahmudi, faktor sistem yang meliputi budaya kinerja. Budaya kinerja yang ada di dalam organisasi akan mempengaruhi pegawai dalam melaksanakan tugas pekerjaan. Berdasarkan wawancara dapat kita simpulkan bahwa budaya kerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman tidak memiliki budaya yang kaku. Namun lebih menciptakan budaya bekerjasama dan kekeluargaan. Sehingga menciptakan suasana kerja yang lebih nyaman.

Menurut teori Mahmudi, faktor sistem meliputi sistem kerja, fasilitas kerja, proses organisasi, dan budaya kinerja. Pada sistem kerja penanganan *stunting* dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga semua OPD terkait dalam penanganan *stunting* berpedoman pada petunjuk teknis tersebut. Pada sistem kerja masih memiliki kendala dalam hal fasilitas kerja masih belum mencukupi. Sehingga dalam kegiatan Posyandu dalam penggunaan alat Antropometri Kit harus bergantian yang akan berdampak pada kinerja organisasi. Kemudian pelaksanaan masih ada program yang belum mencapai target salah satunya disebabkan oleh masih kurangnya kemauan masyarakat dalam menghadiri Posyandu. Sehingga indikator kinerja program khususnya pada kegiatan Posyandu belum mencapai target.

5.5 Faktor Kontekstual (Situasi)

Faktor Kontekstual ini meliputi tekanan lingkungan internal dan eksternal. Faktor eksternal meliputi faktor kebijakan, sosial budaya, ekonomi dan teknologi. Keberhasilan Penanggulangan *stunting* di Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman sangat banyak dipengaruhi oleh faktor lingkungan eksternal. Hal ini disebabkan tentunya karena faktor penyebab *stunting* bukan hanya dari kesehatan saja. Pada Tahun 2018 Kabupaten Pasaman ditetapkan sebagai kabupaten prioritas penanganan *stunting*. Berikut ini Peraturan Bupati terkait penanganan *stunting* di Kabupaten Pasaman:

Gambar 5.7
Peraturan Bupati Pasaman No.57 Tahun 2018 Tentang Penanganan *Stunting*



Sumber: Dokumen Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman

Gambar 5.7 merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Bupati Pasaman sebagai landasan penanganan *stunting* pada Tahun 2018 setelah ditetapkannya Kabupaten Pasaman sebagai kabupaten prioritas. Adanya kebijakan dalam penanganan *stunting* ini memiliki dampak positif atau manfaat yang dirasakan dalam

menangani *stunting* di Kabupaten Pasaman sendiri. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman berikut ini:

“Ya sangat membantu ya, apalagi kita diberikan anggaran oleh pusat setiap tahunnya untuk penanganan *stunting*. Saya rasa manfaat dari kebijakan daerah lokus *stunting* ya, untuk daerah lokus itu cepat ditangani dibandingkan daerah yang tidak lokus. Anggaran untuk *stunting*nya ditambah. Ada bantuan dari kabupaten, provinsi maupun dari pusat. Bantuannya bermacam-macam ada bantuan air bersih, jamban rumah sehat, kemudian kelas ibu hamil dan lain sebagainya. Kalau daerah yang belum menjadi lokus bantuan-bantuan seperti tadi belum ada ya. Itu perbedaanya yang jadi lokus atau tidak”. (Wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman tanggal 13 November 2020)

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman menunjukkan bahwa dengan adanya kebijakan pemerintah terkait penanggulangan *stunting* ini sangat membantu dinas-dinas terkait dalam penanggulangan *stunting* terhadap daerah yang menjadi lokus *stunting*. Dimana adanya anggaran khusus yang diberikan kepada daerah yang menjadi lokus dan adanya bantuan-bantuan dari baik dari pusat sampai dari kabupaten/kota. Kemudian dengan adanya kebijakan terkait penanganan *stunting* ini membuat dinas terkait yang dahulu yang belum terlalu fokus mananggulangnya sekarang menjadi lebih terarah dan fokus dalam menanggulangi masalah *stunting* di daerah tersebut. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Gizi dan Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman:

“Sebelum Tahun 2018 kita sudah melakukan penanganan *stunting* tapi belum terlalu fokus, belum ada program-program khusus penanganannya juga. Alat pengukuran pun belum sesuai standar. Berbeda dengan setelah ditetapkannya Kabupaten Pasaman sebagai kabupaten lokus *stunting* ya, sudah ada ada program-program khusus penanganan *stunting*nya ya ada juga bantuan dana khususnya bantuan-

bantuan lainya kemudian peralatan sudah sesuai standar. Saya rasa dengan adanya kebijakan untuk menangani *stunting* ini, sangat mendukung kita sebagai dinas yang terkait dalam menanggulangi *stunting* ini”. (Wawancara dengan Kepala Seksi Gizi dan Keluarga tanggal 16 November 2020)

Hal serupa juga disampaikan oleh salah satu Petugas Gizi Puskesmas Bonjol berikut ini:

“Pas jadi kabupaten prioritas banyak kegiatan-kegiatan, program-program yang masuk untuk penanggulangan *stunting*, kemudian pendanaan khusus untuk *stunting*”. (Wawancara dengan Petugas Gizi Puskesmas Bonjol tanggal 11 Desember 2020)

Adanya kebijakan yang dikeluarkan terkait penanganan *stunting* terintegrasi, baik itu Dinas Kesehatan ataupun dinas lainnya yang terlibat lebih memberikan perhatian lebih terkait penanggulangan *stunting* ini. Hal ini dikarenakan telah diikat oleh kebijakan tersebut yang membuat dinas terkait berkewajiban dalam menanggulangi *stunting*. Dibandingkan tahun sebelum ditetapkannya Kabupaten Pasaman sebagai lokus *stunting* para stakeholder penanganan *stunting* belum memiliki program atau kegiatan khusus penanggulangan *stunting* di Kabupaten Pasaman. Dengan adanya kebijakan ini juga memberikan landasan atau pedoman terhadap program-program yang akan dilakukan dalam menanggulangi *stunting* di Kabupaten Pasaman.

Kebijakan terhadap penanggulangan *stunting* di Kabupaten Pasaman ini juga memberikan efek positif terhadap daerah-daerah yang menjadi lokus *stunting*. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Kepala Sub Bidang Pemerintahan Bappeda Kabupaten Pasaman dalam wawancara bersama peneliti:

“Infrastrukturnya terbangun, contoh Sungai Lolo ini kan salah satu kampung pedalaman, Pamsimas misalnya nanti saluran air bersih dibangun di nagari itu, kan maju juga nanti jadinya nagari itu berkembang juga nagari itu ada juga infrastuktur yang terbangunkan, Paud contohnya Tahun 2018 beberapa buah cuman Paud yang ada di Pasaman namun setelah ada itu diperbanyak lah Paud yang ada Pasaman ini. Contoh kecilnya seperti itu. Kemudian alokasi dananya juga ada”. (Kepala Sub Bidang Pemerintahan Bappeda Kabupaten Pasaman tanggal 06 Januari 2021)

Berdasarkan hasil wawancara ini menunjukkan bahwa ditetapkan suatu daerah menjadi lokus *stunting* juga memberikan dampak positif terhadap pembangunan khususnya infrastruktur di daerah tersebut. Seperti adanya pembangunan saluran air bersih di daerah lokus *stunting*. Sehingga dengan adanya pembangunan ini akan membuat adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah tersebut. Kemudian adanya pembangunan Paud yang lebih banyak sebagai sarana pendidikan bagi anak dan orang tua.

Kebijakan di penanggulangan *stunting* dan ditetapkan Kabupaten Pasaman sebagai lokus atau kabupaten prioritas dapat kita simpulkan bahwa kebijakan ini memberikan dampak yang sangat baik dalam penanggulangan *stunting* di Kabupaten Pasaman. Dimana aktor yang berperan dalam penanggulangan *stunting* lebih memahami tugas kemudian lebih memberikan perhatian lebih terhadap permasalahan gizi di Kabupaten Pasaman salah satunya permasalahan *stunting*. Adanya perkembangan kualitas hidup masyarakat dengan dibangunnya infrastruktur misalnya saluran air bersih di daerah menjadi lokus.

Selain kebijakan, perubahan sosial budaya sangat mempengaruhi percepatan penanganan permasalahan *stunting*. Hal ini karena, faktor utama penyebab *stunting* adalah sosial budaya ini khususnya kepada pola asuh orang tua terhadap balita yang dimilikinya. Berikut ini wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman:

“Kalau mengenai pengetahuan, mereka paham, tahu cuman terkait dengan tindakannya yang kurang. Untuk pengentasannya itu yang kurang. Jadi kita memaksimalkan komunikasi kita dengan katakana lah yang memiliki peran penting kepada masyarakat kampung seperti niniak mamak, bundo kanduang, perangkat kejurongan dan nagari supaya mereka paham mengetahui mengenai pentingnya dan bahayanya mengenai *stunting* ini. Biasanya program ini merupakan program kenangarian. Biasanya mereka sering mengundang kita sebagai narasumber untuk meningkatkan pengetahuan mereka, kader-kader kesehatan mereka dan juga terhadap ibu-ibu hamil yang ada di daerah tersebut”. (Wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman tanggal 13 November 2020)

Hal senada juga disampaikan oleh Wali Nagari Koto Kaciak Kabupaten Pasaman sebagai berikut:

“Kalau sosial budaya masyarakat besar harapan kita untuk tokoh masyarakat atau pemudanya. Kami juga melaksanakan sejenis sosialisasi jadi disamping kader, jorong atau perangkat nagari warga juga bisa mengerti apa itu *stunting*, sehingga masyarakat juga bisa memberikan arahan bagaimana mengurangi angka *stunting* jadi semua komponen bisa menanggulangi *stunting*. Bisa dikatakan semuanya tidak ada lagi yang tidak mengetahui *stunting*. (Wawancara dengan Wali Nagari Koto Kaciak tanggal 07 Desember 2020)

Berdasarkan wawancara tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat terhadap *stunting* hampir keseluruhan sudah memahami, namun kemauan atau kesadaran masyarakat dalam pengentasannya masih kurang. Sehingga dilakukan upaya

salah satunya peningkatan pengetahuan mulai dari kader, perangkat desa, pemuda, dan juga ibu-ibu hamil sehingga benar-benar memahami dan bisa memberikan pemahaman yang lebih kepada masyarakat terkait pentingnya permasalahan gizi ini. Susahnya merubah kebiasaan atau sosial budaya masyarakat diungkapkan oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman berikut ini:

“Merubah sosial budaya itu kan tidak seperti membalikan telapak tangan ya, tentu mempengaruhi sekali cepat atau lambatnya penanganan *stunting* ini. Apalagi budaya seperti pola asuh masyarakat menjadi faktor utama penyebab *stunting* itu. Pola asuh yang asal-asalan, gak begitu di perhatikanlah misalnya. Kan itu nantinya sangat mempengaruhi bagaimana perkembangan si anak”. (Wawancara dengan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman tanggal 20 Desember 2020)

Masyarakat menanggapi bahwa jika kondisi si anak lincah atau kelihatan sehat-sehat saja. Hal ini, membuat para orang tua kurang memperhatikan baik dari segi gizi maupun membawa anak ke Posyandu. Oleh sebab itu diperlukannya sosialisasi kembali kepada orang tua bahwa anak yang lincah gesit bukan berarti tidak perlunya perhatian pemberian makanan yang bergizi atau tidak perlunya dibawa ke Posyandu. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Petugas Gizi Puskesmas Bonjol berikut ini:

“Sosial budaya ya, masyarakat kan misalnya anaknya lincah jadi mereka merasa anak mereka sehat dan tak perlu dibawa ke Posyandu. Banyak juga masyarakat yang menganggap *stunting* itu tidak apa-apa, jadi perlu sosialisasi kepada masyarakat, seperti yang kita katakan tadi kan kita tidak melihat tinggi saja tapi juga otaknya”. (Wawancara dengan Petugas Gizi Puskesmas Bonjol tanggal 11 Desember 2020)

Faktor sosial budaya masih menjadi penghambat dalam upaya penanganan *stunting*. Masyarakat kebanyakan menganggap anak yang pendek adalah faktor

keturunan. Kemudian masyarakat yang ada di Kabupaten Pasaman ketika sakit masih banyak yang mempercayai budaya berobat ke dukun daripada ke bidan atau petugas kesehatan. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Sub Bidang Pemerintahan Bappeda Kabupaten Pasaman berikut ini:

“Sebernarnya semakin kaya seseorang belum tentu anaknya tidak *stunting*. Pola asuh tadi kan. Maka di Paud itu ada diajarkan kepada orang tua gimana pola asuh. Sosial budaya ini menjadi faktor penghambat. Misalnya anaknya pendek masyarakat biasanya menganggap itu hal biasa, itu hanya faktor keturunan. Sedangkan dalam penyebab *stunting* sendiri faktor keturunan itu hanya satu persen yang mempengaruhi. Contoh lainnya ibu yang hamil ini gak bisa ngapa-ngapain atau sakit, nah biasanya masyarakat ini akan membawa ke dukun bukan ke bidan atau tenaga kesehatan karena budaya disini itu. Itulah budaya ini masih menjadi faktor penghambat dalam menangani *stunting* disini. Kalau budaya yang mendukung saya rasa belum ada ya”. (Wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pemerintahan Bappeda Kabupaten Pasaman tanggal 06 Januari 2021)

Selain faktor sosial budaya, ekonomi juga sangat mempengaruhi upaya dalam menangani *stunting*. Oleh sebab itu, dalam mengintervensi *stunting* perlunya perbaikan kualitas perekonomian masyarakat. Kondisi ekonomi ini akan mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam memberikan makanan bergizi kepada si anak. Kondisi ekonomi masyarakat di Kabupaten Pasaman bisa dikatakan belum sejahtera. Hal ini seperti yang diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman kepada peneliti:

“Jelas kondisi ekonomi mempengaruhi, Kadang-kadang saya juga sedih ya ada yang makan nasi putih pakai bawang goreng. Jadi memang keterkaitan ekonomi dengan pencapaian penanganan *stunting* sangat berpengaruh”. (Wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman tanggal 13 November 2020)

Keadaan ekonomi yang rendah menyebabkan kurangnya variasi makanan yang bergizi yang diberikan. Bisa makan saja sehari-hari masyarakat sudah sangat bersyukur. Jadi untuk makanan yang bergizi atau bervariasi tidak terpikirkan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Seksi Gizi dan Kesehatan Keluarga Kabupaten Pasaman sebagai berikut:

“Kemudian kita lihat lagi kearah faktor ekonomi karena memang sebagian besar berasal dari ekonomi kelas menengah kebawah. Mereka masih dominan makanan karbohidrat jadi variasi makanan yang masih kurang itu tantangan kita disini”. (Wawancara dengan Kepala Seksi Gizi dan Keluarga tanggal 16 November 2020)

Berdasarkan wawancara menunjukkan bahwa kejadian *stunting* banyak terjadi pada masyarakat kelas menengah ke bawah. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pasaman sendiri ada sebanyak 20.220 penduduk. Kemiskinan ini tentu sangat dipengaruhi oleh pekerjaan penduduk Kabupaten Pasaman. Berikut merupakan daftar usaha atau bidang pekerjaan Penduduk Kabupaten Pasaman Tahun 2020.

Tabel 5.6
Penduduk di Kabupaten Pasaman Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020

| Lapangan Usaha | Jumlah |
|--------------------------------------|--------|
| Pertanian /Agriculture | 75.424 |
| Industri Pengolahan/Manufacturing | 6.603 |
| Perdagangan, Hotel, dan Restoran | 20.936 |
| Jasa | 14.835 |
| Lainnya | 9.182 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman 2020

Tabel 5.6 menunjukkan bahwa penduduk di Kabupaten Pasaman paling banyak bekerja di sektor pertanian. Selain pendapatan yang rendah sehingga kurangnya

kemampuan untuk menyediakan makanan yang bergizi. Kemudian dengan pekerjaan yang banyak dibidang pertanian membuat kedua orang tua kurang memperhatikan pola asuh terhadap anak mereka. Karena untuk sektor pertanian sendiri masyarakat Pasaman lebih banyak bekerja di sawah. Sehingga orang tua sering meninggalkan anaknya untuk bekerja disawah. Dapat peneliti simpulkan bahwa keadaan ekonomi masyarakat pasaman faktor kedua yang sangat mempengaruhi percepatan *stunting*. Dimana masyarakat masih belum bisa memenuhi dan menyediakan makanan bergizi untuk si anak dengan pekerjaan yang paling banyak yakni di sektor pertanian. Oleh karenanya, Kondisi ekonomi yang lemah akan mempengaruhi daya beli masyarakat. Daya beli yang lemah bagaimana mungkin untuk memebuhi makanan yang bergizi untuk perkembangan si anak. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Wali Nagari Koto Kaciak Kabupaten Pasaman:

“Ekonomi, itu adalah salah satu penyebab terjadinya *stunting*, ekonomi itu otomatis, bagaimana dia bisa memenuhi kebutuhan gizi sedangkan ekonominya lemah”. (Wawancara dengan Wali Nagari Koto Kaciak tanggal 07 Desember 2020)

Selain faktor eksternal keberhasilan suatu organisasi pasti sangat dipengaruhi keadaan internal organisasi. Kondisi internal Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman bisa dikatakan sudah cukup baik. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman berikut ini:

“Untuk internal sumber daya seperti yang sudah saya sampaikan sudah mencukupi ya. Lalu dana, memang kalau kita bicara dana tidak akan pernah cukup ya, namun untuk dana penanganan *stunting* sendiri *alhamdulillah* sudah memadai. Palingan yang belum memadai ya alat antropometri tadi tapi ya kita sudah berupaya untuk mengatasi

permasalahan sarana dan prasarana tadi”. (Wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman tanggal 13 November 2020)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat kita simpulkan untuk kondisi lingkungan internal cukup baik. Meskipun masih ada kekurangan dari segi sarana dan prasarana, namun belum memberikan masalah atau kendala yang cukup serius dalam penanganan *stunting*. Karena Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman masih bisa mengatasi kelemahan tersebut dengan memanfaatkan secara baik sarana yang ada.

Pendanaan *stunting* pada tahun 2019 berasal dari APBD dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Tahun 2020 mengalami perubahan. Dana yang berasal dari APBD pada Tahun 2020 dialihkan untuk menanggulangi permasalahan Covid 19 di Kabupaten Pasaman. Oleh sebab itu, pendanaan untuk *stunting* pada Tahun 2020 ini hanya berasal dari BOK. Meskipun begitu, dengan dana yang hanya berasal dari BOK ini masih tetap mencukupi dalam penanganan *stunting*. Karena kegiatan yang berhubungan dengan perkumpulan juga dibatasi pada Tahun 2020 ini. Hal ini disampaikan Kepala Seksi Gizi dan Kesehatan Keluarga berikut ini:

“*Alhamdulillah* dengan adanya Dana BOK dengan alokasi dana 750 juta. Meskipun hanya sekarang hanya berasal dari BOK kegiatan untuk intervensi *stunting* masih bisa terlaksana. Akan tetapi, karena adanya pembatasan jumlah peserta dan sebelumnya ada pelarang untuk pelaksanaan kegiatan pertemuan membuat pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan yang sudah direncanakan”. (Wawancara dengan Kepala Seksi Gizi dan Keluarga tanggal 16 November 2020)

Mahmudi menyebutkan bahwa salah satu yang mempengaruhi kinerja adanya faktor kontekstual (situasi). Faktor kontekstual ini meliputi tekanan lingkungan eksternal maupun internal. Dalam penanganan *stunting* di Kabupaten Pasaman memang

sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal. Seperti yang diketahui bahwa *stunting* merupakan permasalahan multidimensi tidak hanya dari segi kesehatan saja. Lingkungan eksternal pertama yaitu kebijakan. Kebijakan penanganan *stunting* yang dimulai pada Tahun 2018 memberikan dampak positif dalam penanganan *stunting* di Kabupaten Pasaman berbeda daripada tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan dengan adanya kebijakan tersebut membuat para aktor yang berperan dalam menangani *stunting* memberikan fokus yang lebih terhadap penanganan *stunting* karena telah diikat oleh kebijakan atau peraturan tersebut. Selanjutnya yang sangat mempengaruhi dalam penanganan *stunting* di Kabupaten Pasaman adalah keadaan sosial budaya masyarakat yang mengacu kepada budaya masyarakat itu sendiri, pola asuh dan pengetahuan masyarakat akan sadar gizi yang masih kurang. Kemudian ekonomi, untuk Kabupaten Pasaman masih terdapat penduduk miskin dengan pekerjaan utama penduduk yaitu di sektor pertanian. Kondisi ekonomi yang kurang mempengaruhi terhadap daya beli masyarakat dan juga pola asuh terhadap anak.

Selanjutnya, faktor internal meliputi sumber daya yang ada dalam organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman. Berdasarkan wawancara terkait faktor internal dapat disimpulkan bahwa faktor internal Dinas Kesehatan sudah cukup baik, meskipun adanya kekurangan sarana dan prasarana tetapi Dinas Kesehatan berupaya mengatasi kelemahan tersebut. Kemudian adanya perubahan situasi dan kondisi membuat pendanaan penanganan *stunting* mengalami perubahan. Meskipun demikian pendanaan yang ada masih mencukupi dalam penanganan *stunting* di Kabupaten Pasaman.

Terakhir faktor kontekstual, meliputi tekanan atau perubahan lingkungan eksternal dan internal. Dalam penanganan *stunting* adanya kebijakan terhadap penanganan *stunting* yang dimulai Tahun 2018 di Kabupaten Pasaman memberikan arahan bagi *stakeholder* terkait dan lebih memberikan perhatian dalam mengentaskan *stunting* di Kabupaten Pasaman. Penanganan *stunting* sangat dipengaruhi oleh tekanan eksternal terutama sosial budaya masyarakat yang masih belum terlalu memperhatikan pentingnya sadar gizi dan datang ke Posyandu. Hal ini membuat pola asuh terutama dalam memberikan makanan terhadap anak masih kurang diperhatikan. Dan masih kecilnya persentase masyarakat datang ke Posyandu. Kemudian ekonomi, ekonomi yang kurang akan mempengaruhi daya beli orang tua untuk menyediakan makanan yang bergizi untuk anaknya. Oleh sebab itu, dalam penanganan *stunting* memang sangat diperlukan peran lintas sektor untuk meningkatkan pencapaian kinerja dalam penanggulangan *stunting*. Perubahan internal pada Dinas Kesehatan dalam menanggulangi *stunting* yaitu terdapat pada dana. Pada Tahun 2019 dana penanganan *stunting* juga berasal dari APBD namun pada Tahun 2020 adanya situasi pandemic membuat dana APBD dialihkan untuk menangani *covid 19*. Sehingga pada Tahun 2020 dana penanganan *stunting* hanya berasal dari khusus penanganan *stunting* yang disebut BOK *stunting*. Meskipun demikian, dana tersebut masih mencukupi dalam penanganan *stunting* di Kabupaten Pasaman.